BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

KODE KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa peraturan mengenai kode klasifikasi arsip di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan guna mendukung implementasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 12 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip Non Keuangan dan Non Kepegawaian;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1275);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1276);
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 622) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 1128);
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 550);

12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 551);
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 550);
14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabuapten Takalar
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah.
3. Arsip adalah trekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh perusahaan, organisasi politik, organiasasi kemasyarakatan dan perseorangan dan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
5. Kode Klasifikasi Arsip adalah sombol atau tanda pengenal suatu struktur fungsiyang digunakan untuk membantu Menyusun tata letak identitas arsip.
6. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab dibidang pengelolaan arsip dinamis.
7. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
8. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

9. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaanya tinggi dan/atau terus menerus.
10. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
11. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan / atau Lemabga Kearsipan Daerah.
12. Tata Kearsipan adalah suatu cara sistematis dalam pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penerimaan, pendistribusian, penataan, penyimpanan, dan pengawasan.
13. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
14. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan pencitptaan arsip dilingkungannya.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai berikut :

a. sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam Pengelolaan Arsip Dinamis.
b. mewujudkan kode Klasifikasi Arsip sebagai upaya untuk sinkronisasi informasi kearsipan antara kementrian dan pemerintah daerah dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.
c. mewujudkan tertib arsip sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan di pemerintah daerah.
d. menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan Kembali arsip dan
e. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan.

BAB III
KODE KLASIFIKASI
Pasal 3

(1) Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disusun berdasarkan tugas dan fungsi pencipta arsip yang meliputi :
a. fungsi fasilitatif dan
b. fungsi substantif

(3) Fungsi Fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di unit kerja di lingkungan perangkat daerah.

(4) Fungsi Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok pencipta arsip yang membedakan antara pencipta arsip yang satu dengan yang lain.

(5) Klasifikasi arsip menggunakan kode klasifikasi arsip berupa angka.

(6) Kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan dan penemuan Kembali arsip.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode klasifikasi arsip sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 25 Juli 2023
Pj. BUPATI TAKALAR

SETIAWAN ASWAD

Diundangkan di Takalar pada tanggal 25 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2023 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
KODE KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

00 UMUM

00.1 KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN

00.1.1 Telekomunikasi

00.1.2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri

00.1.2.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah

00.1.2.2 Perjalanan Dinas DPRD

00.1.2.3 Perjalanan Dinas Pegawai

00.1.3 Perjalanan Dinas Luar Negeri

00.1.3.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah

00.1.3.2 Perjalanan Dinas DPRD

00.1.3.3 Perjalanan Dinas Pegawai

00.1.4 Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan fasilitas kantor lainnya)

00.1.5 Rapat pimpinan antara lain: Notulen/Risalah Rapat

00.1.6 Penyediaan Konsumsi

00.1.7 Pengurusan Kendaraan Dinas

00.1.7.1 Pengurusan surat-surat kendaraan dinas

00.1.7.2 Pemeliharaan dan perbaikan

00.1.7.3 Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan

00.1.8 Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor

00.1.8.1 Pertamanan/ Landscape

00.1.8.2 Penghijauan

00.1.8.3 Perbaikan Gedung

00.1.8.4 Perbaikan Peralatan Kantor

00.1.8.5 Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma

00.1.8.6 Kebersihan Gedung dan Taman

00.1.9 Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer

00.1.9.1 Perbaikan / Pemeliharaan

00.1.9.2 Pemasangan

00.1.10 Ketertiban dan Keamanan

00.1.10.1 Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawalan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas

00.1.10.2 Laporan Ketertiban dan Keamanan

00.1.11 Administrasi Pengelolaan Parkir

00.1.12 Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya

00.2 PERLENGKAPAN

00.2.1 Inventarisasi dan Penyimpanan

00.2.1.1 Data hasil inventarisasi dan penyimpanan

00.2.1.2 Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan

00.2.1.3 Data hasil pemeliharaan kantor

00.2.1.4 Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor

00.2.2 Distribusi

00.2.2.1 Barang habis pakai

00.2.2.2 Barang milik daerah

00.2.3 Penghapusan Barang Milik Daerah antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan

00.2.4 Pengelolaan Database Barang Milik Daerah

00.3 PENGADAAN

00.3.1 Rencana pengadaan Barang dan jasa (antara lain: : Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, 43 penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)

00.3.2 Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)

00.3.3 Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)

00.3.4 Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)

00.3.5 Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan antara lain : Database pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa

00.3.6 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi

00.4 PERPUSTAKAAN

00.4.1 Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

00.4.2 Deposit Bahan Pustaka

00.4.2.1 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

00.4.2.2 Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman

00.4.2.3 Terbitan Internasional dan Regional

00.4.2.4 Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

00.4.2.5 Bibliografi dan Katalog

00.4.3 Koleksi Pustaka

00.4.3.1 Pembelian

00.4.3.2 Hibah

00.4.3.3 Hadiah

00.4.3.4 Tukar Menukar

00.4.3.5 Implementasi Undang-Undang KCKR

00.4.3.6 Terbitan Internal

00.4.3.7 Pendistribusian bahan pustaka surplus

00.4.3.8 Inventarisasi koleksi (Buku Induk)

00.4.4 Pengolahan Bahan Pustaka

00.4.5 Pangkalan Data Katalog Koleksi

00.4.6 Layanan Perpustakaan

00.4.6.1 Keanggotaan

00.4.6.2 Peminjaman

00.4.6.3 Pengembangan gemar baca

00.4.7 Kerjasama Perpustakaan

00.4.7.1 MoU

00.4.7.2 Perjanjian kerjasama

00.4.7.3 Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional

00.4.8 Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan

00.4.8.1 Pengembangan situs web

00.4.8.2 Pengembangan kemas ulang informasi multimedia

00.4.8.3 Pengembangan program aplikasi perpustakaan

00.4.8.4 Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital

00.4.9 Pangkalan Data Layanan Perpustakaan

00.4.10 Konservasi

00.4.10.1 Perawatan Bahan Perpustakaan

00.4.10.2 Perbaikan Bahan Perpustakaan

00.4.10.3 Penjilidan Bahan Perpustakaan

00.4.11 Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)

00.4.12 Transformasi Digital

00.4.13 Kurasi Digital

00.4.14 Pengembangan Perpustakaan

00.4.14.1 Perpustakaan Umum

00.4.14.2 Perpustakaan Khusus

00.4.14.3 Perpustakaan Sekolah

00.4.14.4 Perpustakaan Perguruan Tinggi

00.5 KEARSIPAN

00.5.1 Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

00.5.2 Pembinaan Kearsipan

00.5.2.1 Pengembangan Profesi Arsiparis, antara lain Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis

	00.5.2.2	Bimbingan Konsultasi Arsiparis
	00.5.2.3	Penilaian Arsiparis
	00.5.2.4	Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan
	00.5.2.5	Database Arsiparis
	00.5.2.6	Bimbingan Konsultasi Kearsipan
	00.5.2.7	Supervisi dan Evaluasi, antara lain: Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi
	00.5.2.8	Database Bimbingan dan Kosultasi dan Supervisi
	00.5.2.9	Fasilitasi Kearsipan, antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan
	00.5.2.10	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, antara lain : Berkas Penyelenggara Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan
	00.5.2.11	Jadwal Retensi Arsip, antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI
00.5.3		Pengelolaan Arsip Dinamis
	00.5.3.1	Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/ Buku Ekspedisi)
	00.5.3.2	Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: daftar berkas dan daftar isi berkas)

00.5.3.3 Penataan Arsip Inaktif (antara lain: daftar arsip inaktif, daftar arsip inaktif tematik)

00.5.3.4 Penggunaan (antara lain: daftar arsip dinamis berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, bukti peminjaman arsip)

00.5.3.5 Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autensitas arsip dinamis

00.5.4 Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital dan Pemulihan Arsip Vital)

00.5.5 Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentifikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga

00.5.6 Penyusutan Arsip

00.5.6.1 Pemindahan Arsip (antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)

00.5.6.2 Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip Yang Dimusnahkan.

00.5.6.3 Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan)

00.5.7 Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan)

00.5.8 Database Pengelolaan Arsip Dinamis

00.5.8.1 Database Pengelolaan Arsip Aktif

00.5.8.2 Database Pengelolaan Arsip Inaktif

00.5.9 Pengelolaan Arsip Statis

00.5.9.1 Akuisisi (antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip, Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan, Daftar Arsip yang diserahkan

00.5.9.2 Penghargaan dan Imbalan

00.5.9.3 Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaser/CD/media lain sesuai perkembangan TI, dan Transki)

00.5.9.4 Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)

00.5.9.5 Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide)

00.5.9.6 Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)

00.5.9.7 Preservasi Kuratif

00.5.9.8 Autentikasi Arsip Statis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentitas arsip statis)

00.5.9.9 Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber)

00.5.10 Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip)

00.5.11 Pengelolaan SIKN dan JIKN

00.5.12 Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana

00.5.13 Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan

00.5.14 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup

00.5.15 Pengawasan Kearsipan

00.5.15.1 Pengawasan Kearsipan Internal

00.5.15.2 Pengawasan Kearsipan Eksternal

00.5.15.3 Sanksi

00.6 PERSANDIAN

00.6.1 Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

00.6.2 Pengamanan persandian

00.6.2.1 Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kripto

00.6.2.2 Analisis sinyal: teknik sandi dan kripto

00.6.2.3 Materiil sandi: sistem dan peralatan

00.6.3 Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi

00.6.3.1 Perencanaan Pengkajian

00.6.3.2 Administrasi Pengkajian

00.6.3.3 Pelaksanaan

00.6.3.4 Pelaporan

00.6.4 Pembinaan dan Pengendalian Persandian
- 00.6.4.1 Sumber Daya Manusia (SDM)
- 00.6.4.2 Jaring Komunikasi

00.6.5 Layanan Sertifikasi Elektronik
- 00.6.5.1 Perencanaan dan Administrasi
- 00.6.5.2 Pelaksanaan Verifikasi
- 00.6.5.3 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
- 00.6.5.4 Penyesuaian Sistem dan Testing
- 00.6.5.5 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna
- 00.6.5.6 Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik
- 00.6.5.7 Pelaporan

00.7 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

00.7.1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan /Musrenbang
- 00.7.1.1 Musrenbang Provinsi
- 00.7.1.2 Musrenbang Nasional
- 00.7.1.3 Musrenbang Kab/Kota
- 00.7.1.4 Musrenbang Kecamatan
- 00.7.1.5 Musrenbang Kelurahan
- 00.7.1.6 Musrenbang Desa

00.7.2 Perencanaan Pembangungan Daerah
- 00.7.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang
- 00.7.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah
- 00.7.2.3 Rencana Anggaran Daerah
- 00.7.2.4 Rencana Pembangunan Tahunan
- 00.7.2.5 Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah
- 00.7.2.6 Program kerja tahunan
- 00.7.2.7 Penetapan / Kontrak Kinerja
- 00.7.2.8 Laporan Berkala
- 00.7.2.9 Laporan Insidential
- 00.7.2.10 Evaluasi Program

00.7.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

00.7.4 Konsultasi Perencanaan Pembangunan

00.7.5 Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan

00.7.6 Aksi Strategis Daerah
- 00.7.6.1 Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah

00.7.6.2 Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah
00.7.6.3 Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah
00.7.6.4 Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah
00.7.6.5 Penerapan perencaan aksi strategi daerah

00.7.7 Perencanaan Pendanaan Pembangunan
00.7.7.1 Pendanaan Nasional dan Hibah
00.7.7.2 Pendanaan Daerah
00.7.7.3 Kerjasama Pembangunan Nasional
00.7.7.4 Surat Berharga Syariah Negara
00.7.7.5 Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru

00.8 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
00.8.1 Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
00.8.1.1 Pembentukan
00.8.1.2 Pengubahan
00.8.1.3 Pembubaran
00.8.2 Uraian Jabatan
00.8.2.1 Analisa Jabatan
00.8.2.2 Analisa Beban Kerja
00.8.3 Ketatalaksanaan
00.8.3.1 Proses Bisnis
00.8.3.2 Standar Pelayanan
00.8.3.3 Standar Operasional Prosedur
00.8.3.4 Pelayanan Publik
00.8.4 Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional
00.8.5 Evaluasi Kelembagaan
00.8.6 Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi
00.8.6.1 Budaya Kerja
00.8.6.2 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
00.8.6.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

00.9 PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN

- 00.9.1 Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
- 00.9.2 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan meliputi: rencana kerja, administrasi penelitian, pelaksanaan, hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi
- 00.9.3 Sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian, hasil pengkajian dan pengembangan
- 00.9.4 Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan
- 00.9.5 Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 00.9.6 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
  - 00.9.6.1 Data
  - 00.9.6.2 Statistik
  - 00.9.6.3 Jurnal Hasil Penelitian/ Pengkajian
- 00.9.7 *Master proceeding* / jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 00.9.8 Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
- 00.9.9 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
- 00.9.10 Seminar, lokakarya, temukarya, workshop

100 PEMERINTAHAN

100.1 OTONOMI DAERAH

- 100.1.1 Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 100.1.2 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)
- 100.1.3 Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus, Daerah Istimewa dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)

100.1.4.1 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah

100.1.4.2 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD

100.1.4.3 Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan

100.1.4.4 Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)

100.1.4.5 Assosiasi Daerah

100.1.5 Otonomi khusus dan daerah istimewa

100.1.6 Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)

100.1.6.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

100.1.6.2 Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah

100.1.6.3 Pengembangan Kapasitas Daerah

100.1.7 LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)

100.2 PEMERINTAHAN UMUM

100.2.1 Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum\yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

100.2.2 Dekonsentrasi dan Kerjasama

100.2.2.1 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

100.2.2.2 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah

100.2.2.3 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah

100.2.2.4 Fasilitasi Kecamatan

100.2.2.5 Fasilitasi Pelayanan Umum

100.2.3 Wilayah Administrasi dan Perbatasan

100.2.3.1 Toponimi dan Data Wilayah

100.2.3.2 Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara

100.2.3.3 Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan

100.2.3.4 Pemeliharaan Batas Wilayah

100.3 HUKUM

100.3.1 Program Legislasi

100.3.1.1 Bahan/Materi Program Legislasi Daerah

100.3.1.2 Program Legislasi

100.3.2 Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan

100.3.3 Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah

100.3.3.1 Keputusan / Ketetapan Gubernur

100.3.3.2 Keputusan / Ketetapan Bupati

100.3.3.3 Keputusan / Ketetapan Walikota

100.3.3.4 Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi

100.3.3.5 Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten

100.3.3.6 Keputusan Sekretaris Daerah Kota

100.3.4 Instruksi / Surat Edaran

100.3.4.1 Instruksi / Surat Edaran Provinsi

100.3.4.2 Instruksi / Surat Edaran Kabupaten

100.3.4.3 Instruksi / Surat Edaran Kota

100.3.4.4 Instruksi / Surat Edaran Setingkat Eselon II

100.3.5 Surat Perintah

100.3.5.1 Surat Perintah Gubernur

100.3.5.2 Surat Perintah Bupati

100.3.5.3 Surat Perintah Walikota

100.3.5.4 Surat Perintah Setingkat Eselon II

100.3.6 Standar/ Pedoman/ Prosedur Kerja/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis

100.3.7 Nota Kesepakatan/ *Memorandum of Understanding (MOU)* / Kontrak/ Perjanjian kerja sama

100.3.7.1 Dalam Negeri

100.3.7.2 Luar Negeri

100.3.8 Dokumentasi Hukum, (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)

100.3.9 Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum

100.3.10 Bantuan/ Konsultasi Hukum/ Advokasi Pemberian bantuan/ konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)

100.3.11 Kasus/ Sengketa Hukum

100.3.11.1 Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran

100.3.11.2 Perdata Kasus/sengketa perdata

100.3.11.3 Tata Usaha Negara

100.3.11.4 Perburuhan

100.3.11.5 Arbitrase

100.3.11.6 Sengketa Adat

100.3.12 Perizinan

100.3.13 Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

100.3.13.1 Hak Cipta

100.3.13.2 Hak Paten

100.3.13.3 Hak Desain Industri

100.3.13.4 Hak Rahasia Dagang

100.3.13.5 Hak Merk

100.3.14 Permohonan HAKI yang ditolak

200 POLITIK

200.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

200.1.1 Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

200.1.2 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

200.1.2.1 Ketahanan Ideologi Negara

200.1.2.2 Wawasan Kebangsaan

200.1.2.3 Bela Negara

200.1.2.4 Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan

	200.1.2.5	Pembauran dan Kewarganegaraan
200.1.3	Kewaspadaan Nasional	
	200.1.3.1	Fasilitasi dan Evaluasi
	200.1.3.2	Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan
	200.1.3.3	Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan
	200.1.3.4	Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial
	200.1.3.5	Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
200.1.4	Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan	
	200.1.4.1	Ketahanan Seni
	200.1.4.2	Ketahanan Budaya
	200.1.4.3	Agama dan Kepercayaan
	200.1.4.4	Organisasi Kemasyarakatan
	200.1.4.5	Masalah Sosial Kemasyarakatan
	200.1.4.6	Fasilitasi
	200.1.4.7	Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat
	200.1.4.8	Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL
	200.1.4.9	Evaluasi Aktifitas Ormas: Sanksi Administrasi
	200.1.4.10	Fasilitasi Sengketa Ormas
	200.1.4.11	Fasilitasi Ormas
200.1.5	Politik Dalam Negeri	
	200.1.5.1	Implementasi Kebijakan Politik
	200.1.5.2	Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan
	200.1.5.3	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik
	200.1.5.4	Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi
	200.1.5.5	Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi
	200.1.5.6	Pemerintah Daerah
	200.1.5.7	Database Parpol
	200.1.5.8	Pendidikan Budaya Politik
	200.1.5.9	Pemilihan Umum

200.1.6 Ketahanan Ekonomi

200.1.6.1 Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian

200.1.6.2 Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter

200.1.6.3 Perilaku Perekonomian Masyarakat

200.1.6.4 Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi

200.2 PEMILU

200.2.1 Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

200.2.2 Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

200.2.2.1 Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu

200.2.2.2 Daftar Pemilih Sementara (DPS)

200.2.2.3 Daftar Pemilih Tambahan

200.2.2.4 Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)

200.2.2.5 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

200.2.3 Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

200.2.3.1 Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik

200.2.3.2 Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik

200.2.3.3 Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan

200.2.3.4 Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual

200.2.4 Penetapan Peserta Pemilu

200.2.4.1 Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota

200.2.4.2 Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR

200.2.4.3 Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR

	200.2.4.4	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota 270.04.05 Peta Daerah Pemilihan
200.2.5	Pencalonan Pemilu	
	200.2.5.1	Petunjuk teknis pencalonan
	200.2.5.2	Surat pencalonan pendaftaran
	200.2.5.3	Daftar bakal calon
	200.2.5.4	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon
	200.2.5.5	Dokumen verifikasi administrasi
	200.2.5.6	Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap
	200.2.5.7	Kampanye Pemilu Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye
	200.2.5.8	Nama juru kampanye/pelaksana kampanye
	200.2.5.9	Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye
200.2.6	Dana Kampanye	
	200.2.6.1	Pedoman audit dana kampanye
	200.2.6.2	Laporan dana kampanye peserta Pemilu
	200.2.6.3	Laporan hasil audit dana kampanye
200.2.7	Pemungutan dan Penghitungan Suara	
	200.2.7.1	Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara
	200.2.7.2	Master surat suara
	200.2.7.3	Surat suara yang terpakai
	200.2.7.4	Surat Suara Tidak terpakai(rusak, salah, dan tidak digunakan)
	200.2.7.5	Formulir pemilu di Pemerintah Daerah
200.2.8	Penetapan Hasil Pemilu	
200.2.9	Perselisihan Hasil Pemilu	
	200.2.9.1	Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu
	200.2.9.2	Jawaban dan kesimpulan termohon

200.2.9.3 Salinan Putusan lembaga peradilan

200.2.10 Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu

300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN

300.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

300.1.1 Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah

300.1.2 Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja

300.1.2.1 Tata Operasiona Polisi Pamong Praja

300.1.2.2 Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja

300.1.3 Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja

300.1.4 Perlindungan Masyarakat

300.1.5 Penyidik Pegawai Negeri Sipil

300.1.6 Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia

300.2 PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN

300.2.1 Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

300.2.2 Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan

300.2.2.1 Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan

300.2.2.2 Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring

300.2.2.3 Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan

300.2.2.4 Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan

300.2.2.5 Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan

300.2.2.6 Registrasi BEACON 3

300.2.3 Pencegahan dan Kesiapsiagaan

300.2.4 Potensi Pencarian dan Pertolongan

300.2.5 Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan
- 300.2.5.1 Rencana Pendidikan dan Pelatihan
- 300.2.5.2 Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan
- 300.2.5.3 Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
- 300.2.5.4 Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)
- 300.2.5.5 Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan

300.2.6 Operasi Pencarian dan Pertolongan

300.2.7 Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi

300.2.8 Operasi Komunikasi
- 300.2.8.1 Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)
- 300.2.8.2 Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)
- 300.2.8.3 Registrasi BEACON

300.2.9 Inventarisasi dan Pemeliharaan

300.2.10 Pengembangan Sistem Informasi

300.2.11 Penyajian dan Layanan Informasi

300.2.12 Pelapooran dan Evaluasi
- 300.2.12.1 Laporan Harian
- 300.2.12.2 Laporan Bulanan
- 300.2.12.3 Laporoan Tahunan
- 300.2.12.4 Evaluasi

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

400.1 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
- 400.1.1 Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.1.2 Pembangunan Sumber Daya
  - 400.1.2.1 Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya
  - 400.1.2.2 Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya
  - 400.1.2.3 Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya

400.1.2.4 Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup
400.1.2.5 Fasilitasi Teknologi dan inovasi
400.1.2.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya
400.1.2.7 Pemantauan dan evaluasi

400.1.3 Peningkatan Infrastruktur
400.1.3.1 Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur
400.1.3.2 Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur
400.1.3.3 Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur
400.1.3.4 Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur
400.1.3.5 Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur
400.1.3.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur
400.1.3.7 Pemantauan dan evaluasi

400.1.4 Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha
400.1.4.1 Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha
400.1.4.2 Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha
400.1.4.3 Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah
400.1.4.4 Fasilitasi Kemitraan usaha
400.1.4.5 Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan
400.1.4.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha
400.1.4.7 Pemantauan dan evaluasi
400.1.4.8 Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
400.1.4.9 Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
400.1.4.10 Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal
400.1.4.11 Identifikasi dan inventarisasi

pengembangan masyarakat dan desa tertinggal

400.1.4.12 Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal

400.1.4.13 Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal

400.1.4.14 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa

400.1.5 Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya

400.1.5.1 Penguatan kapasitas lembaga lokal

400.1.5.2 Penguatan organisasi masyarakat

400.1.5.3 Pemberdayaan masyarakat

400.1.5.4 Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya

400.1.5.5 Ketenagakerjaan

400.1.5.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya

400.1.5.7 Pemantauan dan evaluasi

400.1.6 Pengembangan Daerah Khusus

400.1.6.1 Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan

400.1.6.2 Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana

400.1.6.3 Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan

400.1.6.4 Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar

400.1.6.5 Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis

400.1.6.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus

400.1.6.7 Pemantauan dan evaluasi

400.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

400.2.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.2.2 Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum

400.2.2.1 Data gender

400.2.2.2 Advokasi dan fasilitasi

400.2.3 Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)

400.2.3.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan

400.2.3.2 Data perlindungan perempuan

400.2.3.3 Advokasi dan fasilitasi

400.2.3.4 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan

400.2.3.5 Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender

400.2.3.6 Analisis dan penyajian informasi gender

400.2.3.7 Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu

400.2.4 Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)

400.2.4.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

400.2.4.2 Data perlindungan anak

400.2.4.3 Advokasi dan fasilitasi

400.2.4.4 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak

400.2.4.5 Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak

400.2.5 Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)

400.2.5.1 Pemenuhan Hak Anak

400.2.5.2 Data Klaster Hak Anak

400.2.5.3 Data tumbuh kembang anak

400.2.5.4 Advokasi dan fasilitasi

400.2.5.5 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak

400.2.5.6 Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak

400.2.6 Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)

400.2.7 Penghargaan Kabupaten Layak Anak

400.2.8 Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak

400.3 PENDIDIKAN

400.3.1 Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.3.2 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal

400.3.2.1 Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)

400.3.2.2 Pelatihan Sosial

400.3.2.3 Peringatan Hari anak

400.3.2.4 *Block Grant*

400.3.3 Pendidikan Masyarakat

400.3.3.1 Penyelenggaraan Program

400.3.3.2 Penilaian dan pemberian bantuan sosial

400.3.3.3 Pembinaan Program

400.3.3.4 Lomba/Pemberian Penghargaan

400.3.3.5 Pameran

400.3.3.6 Rakor

400.3.3.7 Sosialisasi

400.3.3.8 Sertifikasi dan Akreditasi

400.3.4 Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik

400.3.5 Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama

400.3.5.1 Kurikulum, bahan ajar

400.3.5.2 *Block Grant*

400.3.5.3 Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,

400.3.5.4 Lomba, penghargaan, penganugerahan

400.3.5.5 Bantuan operasional sekolah (BOS)

400.3.5.6 Bantuan Siswa Miskin

400.3.6 Pendidikan khusus/Layanan Khusus

400.3.6.1 Kurikulum, Bahan ajar, alat bantu pembelajaran

400.3.6.2 *Block Grant*

400.3.6.3 Lomba, festival

400.3.6.4 Sosialisasi, bimtek

400.3.6.5 Pendataan

400.3.6.6 Kelembagaan

400.3.7 Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik

400.3.7.1 Pendataan dan Pemeetaan

400.3.7.2 Uji Kompetensi Guru

400.3.7.3 Sertifikasi Guru

400.3.7.4 Penghargaan guru dan tenaga kependidikan

400.3.7.5 Peningkatan kesejahteraan guru

400.3.7.6 Sosialisasi, bimtek

400.3.7.7 *Block Grant*

400.3.8 Sekolah Menengah Atas

400.3.8.1 Kurikulum

400.3.8.2 Bahan Ajar
400.3.8.3 Pelatihan
400.3.8.4 *Block Grant*
400.3.8.5 Bimbingan teknis/sosialisasi
400.3.8.6 Lomba, Sayembara, festival
400.3.8.7 Bantuan operasional Sekolah (BOS)
400.3.8.8 Bantuan siswa miskin

400.3.9 Pendidikan Khusus-Layanan Khusus
400.3.9.1 Bahan ajar
400.3.9.2 Petunjuk Teknis
400.3.9.3 *Block Grant*
400.3.9.4 Sosialisasi, bimtek
400.3.9.5 Lomba, sayembara, jambore, festival
400.3.9.6 Kurikulum/bahan pembelajaran
400.3.9.7 Alat bantu pembelajaran
400.3.9.8 Pendataan
400.3.9.9 Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi

400.3.10 Pendidik dan Tenaga Pendidik
400.3.10.1 Pendataan dan Pemetaan
400.3.10.2 Uji Kompetensi Guru
400.3.10.3 Sertifikasi Guru
400.3.10.4 Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah
400.3.10.5 Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
400.3.10.6 Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik
400.3.10.7 *Block Grant*
400.3.10.8 Bimbingan teknis/sosialisasi

400.3.11 Penilaian Pendidikan
400.3.11.1 Penilaian Akademik
400.3.11.2 Penilaian Non Akademik
400.3.11.3 Analisis dan Sistem Informasi Penilaian

400.3.12 Data dan Statistik Pendidikan
400.3.12.1 Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
400.3.12.2 Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran

400.3.13 Prasarana dan Sarana Pendidikan
400.3.13.1 Prasarana Pendidikan
400.3.13.2 Sarana Pendidikan
400.3.13.3 Monitoring dan Evaluasi

400.4 KEOLAHRAGAAN

- 400.4.1 Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.4.2 Pengelolaan Olahraga Pendidikan
  - 400.4.2.1 Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah
  - 400.4.2.2 Olahraga Pendidikan Tinggi
  - 400.4.2.3 Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal
- 400.4.3 Pengelolaan Olahraga Rekreasi
  - 400.4.3.1 Olahraga Massal
  - 400.4.3.2 Olahraga Tradisional
  - 400.4.3.3 Olahraga Petualangan, Tantangan dan wisata
- 400.4.4 Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga
  - 400.4.4.1 Olahraga Pendidikan
  - 400.4.4.2 Olahraga Rekreasi
  - 400.4.4.3 Olahraga Prestasi
  - 400.4.4.4 Sekolah Khusus Olahraga
- 400.4.5 Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus
  - 400.4.5.1 Olahraga Tradisional
  - 400.4.5.2 Layanan Khusus
- 400.4.6 Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
  - 400.4.6.1 Kemitraan Keolahragaan
  - 400.4.6.2 Penghargaan Olahraga
- 400.4.7 Pembibitan dan IPTEK Olahraga
  - 400.4.7.1 Pembibitan Olahraga
  - 400.4.7.2 Kompetisi
  - 400.4.7.3 IPTEK Olahraga
- 400.4.8 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
  - 400.4.8.1 Tenaga Keolahragaan
  - 400.4.8.2 Organisasi Keolahragaan
- 400.4.9 Industri dan Promosi Olahraga
  - 400.4.9.1 Industri Olahraga
  - 400.4.9.2 Promosi Olahraga
- 400.4.10 Olahraga Prestasi
  - 400.4.10.1 Daerah
  - 400.4.10.2 Nasional
  - 400.4.10.3 Internasional
- 400.4.11 Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga
  - 400.4.11.1 Standardisasi Keolahragaan
  - 400.4.11.2 Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan
  - 400.4.11.3 Infrastruktur Olahraga

400.5 KEPEMUDAAN

400.5.1 Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.5.2 Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda

400.5.2.1 Penelusuran (Duta Kepemudaan)

400.5.2.2 Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)

400.5.2.3 Pengembangan

400.5.3 Peningkatan Wawasan Pemuda

400.5.3.1 Wawasan Kebangsaan

400.5.3.2 Wawasan Lingkungan

400.5.3.3 Wawasan Sosial dan Hukum

400.5.4 Peningkatan Kapasitas Pemuda

400.5.4.1 Kapasitas Iman dan Taqwa

400.5.4.2 Kapasitas IPTEK

400.5.4.3 Pemanfaatan IPTEK

400.5.5 Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)

400.5.5.1 Pengkajian

400.5.5.2 Pengembangan

400.5.5.3 Pendayagunaan (fasilitasi)

400.5.6 Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda

400.5.6.1 Kepemimpinan: Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan

400.5.6.2 Kepeloporan Pemuda: Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan

400.5.7 Kewirausahaan

400.5.7.1 Kelembagaan

400.5.7.2 Pengaderan

400.5.7.3 Perintisan

400.5.8 Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan

400.5.8.1 Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan: Kelembagaan dan Sumberdaya

400.5.8.2 Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan: Kelembagaan dan Sumberdaya

400.5.8.3 Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya

400.5.8.4 Pengawasan Kepramukaan: Kelembagaan, Program dan Sumberdaya

400.5.9 Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda

400.5.9.1 Standardisasi

400.5.9.2 Infrastruktur Pemuda

400.5.10 Kemitraan dan Penghargaan Pemuda
400.5.10.1 Kemitraan
400.5.10.2 Penghargaan Pemuda

400.6 KEBUDAYAAN
400.6.1 Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.6.2 Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
400.6.2.1 Registrasi Nasional
400.6.2.2 Pelindungan
400.6.2.3 Pengembangan dan Pemanfaatan
400.6.2.4 Eksplorasi dan Dokumentasi
400.6.3 Pembinaan Kesenian dan Perfilman
400.6.3.1 Pembinaan Seni Pertunjukan
400.6.3.2 Pembinaan Seni Rupa
400.6.3.3 Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film
400.6.3.4 Dokumentasi dan Publikasi
400.6.4 Sejarah dan Nilai Budaya
400.6.4.1 Sejarah
400.6.4.2 Pemetaan nilai
400.6.4.3 Verifikasi dan Perumusan Nilai
400.6.4.4 Dokumentasi dan Publikasi
400.6.4.5 Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah
400.6.4.6 Publikasi sejarah dan nilai sejarah
400.6.5 Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
400.6.5.1 Internalisasi nilai budaya
400.6.5.2 Kekayaan budaya
400.6.5.3 Warisan budaya nasional dan dunia
400.6.5.4 Diplomasi budaya

400.7 KESEHATAN
400.7.1 Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.7.2 Upaya Kesehatan Dasar
400.7.2.1 Pelayanan kedokteran keluarga
400.7.2.2 Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer
400.7.2.3 Pelaksanaan kesehatan primer
400.7.2.4 Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas
400.7.2.5 Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit
400.7.2.6 ICD 10, Destistry & Stomatology
400.7.2.7 Infeksi menular lewat transfusi darah
400.7.2.8 Penyakit mulut di tingkat primer
400.7.2.9 Pembiayaan darah
400.7.2.10 Penggunaan darah rasional

400.7.2.11 Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah

400.7.2.12 Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan

400.7.2.13 Akreditasi puskesmas

400.7.2.14 Puskesmas berprestasi

400.7.3 Upaya Kesehatan Rujukan

400.7.3.1 Pelayanan kesehatan rujukan

400.7.3.2 Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)

400.7.3.3 Pelayanan rumah sakit privat

400.7.3.4 Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya

400.7.3.5 Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan

400.7.3.6 Pelayanan pasien jaminan kesehatan

400.7.3.7 Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa

400.7.3.8 Badan pengawas rumah sakit

400.7.3.9 Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)

400.7.3.10 Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya

400.7.4 Keperawatan dan keteknisian medik

400.7.4.1 Pelayanan Keperawatan Dasar

400.7.4.2 Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit

400.7.4.3 Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum

400.7.4.4 Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus

400.7.4.5 Bina pelayanan kebidanan

400.7.5 Penunjang medik dan sarana kesehatan

400.7.5.1 Mikrobiologi dan imunologi

400.7.5.2 Patologi dan toksilogi

400.7.5.3 Radiologi

400.7.5.4 Perizinan dan sertifikasi

400.7.5.5 Sarana dan prasarana kesehatan

400.7.5.6 Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan

400.7.5.7 Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan

400.7.6 Kesehatan Jiwa
- 400.7.6.1 Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan
- 400.7.6.2 Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan
- 400.7.6.3 Etikolegal dan asesmen
- 400.7.6.4 Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya
- 400.7.6.5 Etikolegal dan asesmen
- 400.7.6.6 Kesehatan jiwa kelompok beresiko

400.7.7 Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
- 400.7.7.1 Surveilans dan respon kejadian luar biasa
- 400.7.7.2 Imunisasi
- 400.7.7.3 Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan
- 400.7.7.4 Kesehatan matra

400.7.8 Pengendalian penyakit menular langsung
- 400.7.8.1 Pengendalian tuberkolosis
- 400.7.8.2 Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual
- 400.7.8.3 Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut
- 400.7.8.4 Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan
- 400.7.8.5 Pengendalian kusta dan frambusia

400.7.9 Pengendalian penyakit bersumber binatang
- 400.7.9.1 Pengendalian malaria
- 400.7.9.2 Pengendalian arbovirosis
- 400.7.9.3 Pengendalian zoonosis
- 400.7.9.4 Pengendalian filariasis dan kecacingan

400.7.10 Pengendalian penyakit tidak menular
- 400.7.10.1 Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah
- 400.7.10.2 Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik
- 400.7.10.3 Penyakit kanker
- 400.7.10.4 Penyakit kronis dan generatif
- 400.7.10.5 Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan

400.7.11 Penyehatan lingkungan
- 400.7.11.1 Penyehatan air dan sanitasi dasar
- 400.7.11.2 Pemukiman dan tempat umum
- 400.7.11.3 Kawasan dan sanitasi darurat
- 400.7.11.4 Higien sanitasi pangan
- 400.7.11.5 Pengamanan limbah, udara, radiasi

400.7.12 Pengembangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan

400.7.13 Gizi

- 400.7.13.1 Gizi makro
- 400.7.13.2 Gizi mikro
- 400.7.13.3 Gizi klinik dan diatetik
- 400.7.13.4 Konsumsi makanan dan jasa makanan
- 400.7.13.5 Kewaspadaan gizi

400.7.14 Kesehatan ibu

- 400.7.14.1 Kesehatan ibu hamil
- 400.7.14.2 Kesehatan ibu bersalin dan nifas
- 400.7.14.3 Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi
- 400.7.14.4 Keluarga berencana
- 400.7.14.5 Perlindungan kesehatan reproduksi

400.7.15 Kesehatan anak

- 400.7.15.1 Kelangsungan hidup bayi
- 400.7.15.2 Kelangsungan anak balita dan pra sekolah
- 400.7.15.3 Kewaspadaan penanganan balita beresiko
- 400.7.15.4 Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja
- 400.7.15.5 Perlindungan kesehatan anak

400.7.16 Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer

- 400.7.16.1 Kesehatan tradisional keterampilan
- 400.7.16.2 Kesehatan tradisional ramuan
- 400.7.16.3 Kesehatan alternatif dan komplementer
- 400.7.16.4 Penapisan dan kemitraan

400.7.17 Kesehatan kerja dan Olah raga

- 400.7.17.1 Pelayanan kesehatan kerja
- 400.7.17.2 Kapasitas kerja
- 400.7.17.3 Lingkungan kerja
- 400.7.17.4 Kemitraan kesehatan kerja
- 400.7.17.5 Kesehatan perkotaan
- 400.7.17.6 Kesehatan olahraga

400.7.18 Obat Publk dan perbekalan kesehatan

- 400.7.18.1 Harga obat publik
- 400.7.18.2 Pengadaan obat
- 400.7.18.3 Perbekalan kesehatan

400.7.19 Produksi dan distribusi alat kesehatan

- 400.7.19.1 Alat kesehatan
- 400.7.19.2 Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat

400.7.6.1 Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan
400.7.6.2 Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan
400.7.6.3 Etikolegal dan asesmen
400.7.6.4 Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya
400.7.6.5 Etikolegal dan asesmen
400.7.6.6 Kesehatan jiwa kelompok beresiko
400.7.7 Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
400.7.7.1 Surveilans dan respon kejadian luar biasa
400.7.7.2 Imunisasi
400.7.7.3 Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan
400.7.7.4 Kesehatan matra
400.7.8 Pengendalian penyakit menular langsung
400.7.8.1 Pengendalian tuberkolosis
400.7.8.2 Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual
400.7.8.3 Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut
400.7.8.4 Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan
400.7.8.5 Pengendalian kusta dan frambusia
400.7.9 Pengendalian penyakit bersumber binatang
400.7.9.1 Pengendalian malaria
400.7.9.2 Pengendalian arbovirosis
400.7.9.3 Pengendalian zoonosis
400.7.9.4 Pengendalian filariasis dan kecacingan
400.7.10 Pengendalian penyakit tidak menular
400.7.10.1 Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah
400.7.10.2 Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik
400.7.10.3 Penyakit kanker
400.7.10.4 Penyakit kronis dan generatif
400.7.10.5 Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan
400.7.11 Penyehatan lingkungan
400.7.11.1 Penyehatan air dan sanitasi dasar
400.7.11.2 Pemukiman dan tempat umum
400.7.11.3 Kawasan dan sanitasi darurat
400.7.11.4 Higien sanitasi pangan
400.7.11.5 Pengamanan limbah, udara, radiasi

400.7.12 Pengembangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan

400.7.13 Gizi

- 400.7.13.1 Gizi makro
- 400.7.13.2 Gizi mikro
- 400.7.13.3 Gizi klinik dan diatetik
- 400.7.13.4 Konsumsi makanan dan jasa makanan
- 400.7.13.5 Kewaspadaan gizi

400.7.14 Kesehatan ibu

- 400.7.14.1 Kesehatan ibu hamil
- 400.7.14.2 Kesehatan ibu bersalin dan nifas
- 400.7.14.3 Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi
- 400.7.14.4 Keluarga berencana
- 400.7.14.5 Perlindungan kesehatan reproduksi

400.7.15 Kesehatan anak

- 400.7.15.1 Kelangsungan hidup bayi
- 400.7.15.2 Kelangsungan anak balita dan pra sekolah
- 400.7.15.3 Kewaspadaan penanganan balita beresiko
- 400.7.15.4 Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja
- 400.7.15.5 Perlindungan kesehatan anak

400.7.16 Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer

- 400.7.16.1 Kesehatan tradisional keterampilan
- 400.7.16.2 Kesehatan tradisional ramuan
- 400.7.16.3 Kesehatan alternatif dan komplementer
- 400.7.16.4 Penapisan dan kemitraan

400.7.17 Kesehatan kerja dan Olah raga

- 400.7.17.1 Pelayanan kesehatan kerja
- 400.7.17.2 Kapasitas kerja
- 400.7.17.3 Lingkungan kerja
- 400.7.17.4 Kemitraan kesehatan kerja
- 400.7.17.5 Kesehatan perkotaan
- 400.7.17.6 Kesehatan olahraga

400.7.18 Obat Publk dan perbekalan kesehatan

- 400.7.18.1 Harga obat publik
- 400.7.18.2 Pengadaan obat
- 400.7.18.3 Perbekalan kesehatan

400.7.19 Produksi dan distribusi alat kesehatan

- 400.7.19.1 Alat kesehatan
- 400.7.19.2 Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat

400.7.19.3 Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga

400.7.20 Kefarmasian

400.7.20.1 Pelayanan kefarmasian

400.7.20.2 Farmasi klinis

400.7.20.3 Farmasi Komunitas

400.7.20.4 Penggunaan obat rasional

400.7.21 Produksi dan distribusi kefarmasian

400.7.21.1 Obat tradisional

400.7.21.2 Kosmetik dan makanan

400.7.21.3 Narkotika, psikotropika, prekursor farmasidan sediaan farmasi khusus

400.7.21.4 Kemandirian obat dan bahan baku obat

400.7.22 Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan

400.7.22.1 Surat keterangan

400.7.22.2 Sertifikasi dan perijinan

400.7.23 Penanggulangan Krisis Kesehatan

400.7.23.1 Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan

400.7.23.2 Tanggap darurat dan pemulihan

400.7.23.3 Pemantauan dan informasi

400.7.23.4 Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan

400.7.23.5 Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana

400.7.24 Pengembangan dan Jaminan Kesehatan

400.7.24.1 Tersedianya data NHA setiap tahun

400.7.24.2 Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN

400.7.25 Intelegensia Kesehatan

400.7.25.1 Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan

400.7.25.2 Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan

400.7.26 Kesehatan Haji

400.7.26.1 Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji

400.7.26.2 Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji

400.7.27 Promosi Kesehatan

400.7.27.1 Sarana Promosi Kesehatan

400.7.27.2 Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran

400.7.27.3 Pengembangan pesan promosi kesehatan

400.7.27.4 Hari Kesehatan

400.7.28 Data dan Informasi
- 400.7.28.1 Statistik kesehatan
- 400.7.28.2 Analisis dan diseminasi informasi
- 400.7.28.3 Pengembangan sistem informasi dan bankdata kesehatan

400.7.29 Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan ProdukKomplimen
- 400.7.29.1 Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik
- 400.7.29.2 Standardisasi obat tradisional, kosmetik danproduk komplimen
- 400.7.29.3 Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
- 400.7.29.4 Obat Asli Indonesia

400.7.30 Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
- 400.7.30.1 Penilaian keamanan pangan
- 400.7.30.2 Standardisasi produk pangan
- 400.7.30.3 Inspeksi dan sertifikasi produk pangan
- 400.7.30.4 Surveilan dan penyuluhan keamanan pangan
- 400.7.30.5 Pengawasan produk dan bahan berbahaya

400.7.31 Rekam Medis

400.8 AGAMA DAN KEPERCAYAAN

400.8.1 Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.8.2 Fasilitasi
- 400.8.2.1 Data Forum Komunikasi Umat Beragama(FKUB) Prov/Kab/Kota
- 400.8.2.2 Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragamadan Kepercayaan
- 400.8.2.3 Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayan
- 400.8.2.4 Kasus Keagamaan
- 400.8.2.5 Kasus Aliran Keagamaan

400.8.3 Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME
- 400.8.3.1 Kelembagaan dan kepercayaan
- 400.8.3.2 Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama
- 400.8.3.3 Komunitas Kepercayaan
- 400.8.3.4 Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional
- 400.8.3.5 Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial

400.9 SOSIAL

400.9.1 Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.9.2 Kesejahteraan Sosial Anak

- 400.9.2.1 Kesejahteraan sosial anak balita
- 400.9.2.2 Kesejahteraan sosial anak terlantar
- 400.9.2.3 Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum
- 400.9.2.4 Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan
- 400.9.2.5 Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus Sosial .

400.9.3 Rehabilitasi Sosial

- 400.9.3.1 Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara,
- 400.9.3.2 mental
  Kelembagaan dan advokasi social
- 400.9.3.3 Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan social
  Sosial Tuna Sosial

400.9.4 Rehabilitasi

- 400.9.4.1 Gelandangan, pengemis dan pemulung
- 400.9.4.2 Tuna susila dan korban traffking perempuan
- 400.9.4.3 Warga binaan lembaga pemasyarakatan
  meliputi penyiapan, reintegrasi
- 400.9.4.4 Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas

400.9.5 Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA

400.9.6 Pelayanan sosial lanjut usia

- 400.9.6.1 Pelayanan sosial dalam dan luar panti
- 400.9.6.2 Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga
- 400.9.6.3 Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan

400.9.7 Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial

400.9.8 Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

400.9.9 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

- 400.9.9.1 Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya

400.9.9.2 Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
400.9.9.3 Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial
400.9.9.4 Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah
400.9.10 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
400.9.10.1 Kesiapsiagaan dan mitigasi
400.9.10.2 Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
400.9.10.3 Pemulihan sosial dan penguatan sosial
400.9.10.4 Kerjasama
400.9.11 Jaminan Sosial
400.9.11.1 Seleksi dan verifikasi
400.9.11.2 Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi
400.9.11.3 Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran
400.9.11.4 Kerjasama
400.9.12 Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial
400.9.12.1 Ketahanan keluarga
400.9.12.2 Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan
400.9.12.3 Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial
400.9.12.4 Kemitraan dunia usaha
400.9.12.5 Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas
400.9.13 Pemberdayaan komunitas adat terpencil
400.9.13.1 Persiapan pemberdayaan
400.9.13.2 Pemberdayaan sumber daya manusia
400.9.13.3 Penggalian dan pengembangan potensi
400.9.13.4 Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil
400.9.13.5 Kerjasama kelembagaan
400.9.14 Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan
400.9.14.1 Identifikasi dan analisis
400.9.14.2 Pengembangan kapasitas
400.9.14.3 Penataan sosial lingkungan kumuh
400.9.14.4 Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas
400.9.14.5 Bantuan Langsung
400.9.14.6 Kerjasama Kelembagaan

400.9.15 Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
- 400.9.15.1 Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan
- 400.9.15.2 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan
- 400.9.15.3 Pengembangan kesetiakawanan sosial
- 400.9.15.4 Pengelolaan taman makam pahlawan

400.10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

400.10.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desayang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.10.2 Pemerintahan Desa dan Kelurahan
- 400.10.2.1 Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan
- 400.10.2.2 Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
- 400.10.2.3 Fasilitasi Permusyawaratan Desa
- 400.10.2.4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- 400.10.2.5 Pengembangan Kapasitas Desa

400.10.3 Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
- 400.10.3.1 Lembaga Masyarakat
- 400.10.3.2 Pembangunan Partisipatif
- 400.10.3.3 Pendataan Potensi Masyarakat
- 400.10.3.4 Pengembangan Kawasan Perdesaan
- 400.10.3.5 Pelatihan Masyarakat

400.10.4 Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
- 400.10.4.1 Budaya Nusantara
- 400.10.4.2 Pemberdayaan Perempuan
- 400.10.4.3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
- 400.10.4.4 Kesejahteraan Sosial
- 400.10.4.5 Tenaga Kerja Perdesaan

400.10.5 Usaha Ekonomi Masyarakat
- 400.10.5.1 Usaha Pertanian dan Pangan
- 400.10.5.2 Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
- 400.10.5.3 Produksi dan Pemasaran
- 400.10.5.4 Usaha Ekonomi dan Keluarga
- 400.10.5.5 Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal

400.10.6 Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan
- 400.10.6.1 Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan

400.10.6.2 Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan
400.10.6.3 Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan
400.10.6.4 Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan
400.10.6.5 Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan
400.10.7 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

400.11 PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN
400.11.1 Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.11.2 Pertamanan
400.11.2.1 Perencanaan Pertamanan
400.11.2.2 Taman Kota
400.11.2.3 Tata Hias dan Ornamen Kota
400.11.3 Pemakaman
400.11.3.1 Perencanaan Pemakaman
400.11.3.2 Pemakaman
400.11.3.3 Pelayanan Pemakaman
400.11.4 Jalur Hijau
400.11.4.1 Perencanaan Jalur Hijau
400.11.4.2 Jalur Hijau Jalan
400.11.4.3 Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air
400.11.5 Peran Serta Masyarakat
400.11.6 Pengawasan dan Penindakan
400.11.7 Pengelolaan Data
400.11.8 Evaluasi dan Pelaporan

400.12 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
400.12.1 Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
400.12.2 Pendaftaran Penduduk
400.12.2.1 Identitas Penduduk
400.12.2.2 Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI
400.12.2.3 Pindah Datang Penduduk Antar Negara
400.12.2.4 Pendataan Penduduk Rentan
400.12.2.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
400.12.3 Pencatatan Sipil
400.12.3.1 Kelahiran dan Kematian
400.12.3.2 Perkawinan dan Perceraian
400.12.3.3 Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan
400.12.3.4 Pencatatan Kewarganegaraan

400.12.3.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi

400.12.4 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

400.12.4.1 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

400.12.4.2 Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan

400.12.4.3 Pengelolaan data Administrasi Kependudukan

400.12.4.4 Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan

400.12.4.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi

400.12.5 Pengembangan Kebijakan Kependudukan

400.12.5.1 Kuantitas Penduduk

400.12.5.2 Kualitas Penduduk

400.12.5.3 Mobilitas Penduduk

400.12.5.4 Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk

400.12.5.5 Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi

400.12.6 Penyerasian Kependudukan

400.12.6.1 Indikator Kependudukan

400.12.6.2 Proyeksi Penduduk

400.12.6.3 Perencanaan Kependudukan

400.12.6.4 Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah

400.12.6.5 Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah

400.13 KELUARGA BERENCANA

400.13.1 Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan Oleh Pemerintah Daerah

400.13.2 Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk

400.13.2.1 Pengumpulan dan pengolahan data

400.13.2.2 Evaluasi dan pelaporan

400.13.3 Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk

400.13.3.1 Penyiapan fasilitas

400.13.3.2 Evaluasi dan pelaporan

400.13.4 Profil dan proyeksi penduduk

400.13.4.1 Data profil dan proyeksi penduduk

400.13.4.2 Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk

400.13.5 Penetapan parameter pengendalian penduduk

400.13.5.1 Penetapan sasaran parameter

400.13.5.2 Evaluasi sasaran parameter

400.13.6 Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk
400.13.6.1 Pemanfaatan profil dan proyeksi
400.13.6.2 Pemanfaatan parameter
400.13.7 Pengembangan Sistem
400.13.7.1 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal
400.13.7.2 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
400.13.8 Pengembangan Materi
400.13.8.1 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal
400.13.8.2 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
400.13.9 Monitoring dan Evaluasi
400.13.9.1 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal
400.13.9.2 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
400.13.10 Analisis Sosial
400.13.11 Analisis Ekonomi
400.13.12 Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan
400.13.13 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
400.13.14 Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik \ Pemerintah
400.13.15 Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana
400.13.16 Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah
400.13.16.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana
400.13.16.2 Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
400.13.17 Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta
400.13.18 Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta
400.13.19 Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta
400.13.19.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta
400.13.19.2 Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta
400.13.20 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur Wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan.
400.13.20.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga

berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan

400.13.20.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan

400.13.21 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan

400.13.21.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan

400.13.21.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan

400.13.22 Kesertaan keluarga berencana pria

400.13.22.1 Peningkatan akses keluarga berencana pria

400.13.22.2 Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria

400.13.23 Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak

400.13.24 Pencegahan PMS dan HIV/AIDS

400.13.25 Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas

400.13.26 Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak.

400.13.26.1 Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak

400.13.26.2 Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak

400.13.27 Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak

400.13.27.1 Monitoring bina keluarga Balita dan anak

400.13.27.2 Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak

400.13.28 Pelembagaan bina ketahanan remaja

400.13.28.1 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan

400.13.28.2 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat

400.13.29 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja

400.13.29.1 Monitoring bina ketahanan remaja

400.13.29.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja

400.13.30 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

400.13.30.1 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia

400.13.30.2 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan

400.13.31 Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan

400.13.31.1 Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

400.13.31.2 Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

400.13.32 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan

400.13.32.1 Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

400.13.32.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan

400.13.33 Pengembangan program usaha ekonomi keluarga

400.13.34 Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi Keluarga

400.13.35 Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga

400.13.35.1 Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga

400.13.35.2 Pengemangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga

400.13.36 Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga

400.13.37 Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera

400.13.38 Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

400.13.38.1 Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

400.13.38.2 Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

400.13.39 Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

400.13.39.1 Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

400.13.39.2 Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

400.13.40 Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi

400.13.40.1 Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi

400.13.40.2 Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi

400.13.40.2 Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi

400.13.41 Advokasi dan pencitraan

400.13.42 Komunikasi, Informasi dan Edukasi

400.13.42.1 Promosi

400.13.42.2 Sarana produksi media komunikasi

400.13.42.3 Produk media komunikasi

400.13.43 Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi

400.13.44 Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota

400.13.44.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota

400.13.44.2 Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota

400.13.45 Hubungan dengan lembaga nonpemerintah

400.13.45.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga non pemerintah

400.13.45.2 Penguatan hubungan dengan lembaga non pemerintah

400.13.46 Tenaga Lini Lapangan

400.13.46.1 Pengembangan tenaga lini lapangan

400.13.46.2 Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan

400.13.47 Institusi Masyarakat Pedesaan

400.13.47.1 Pengembangan institusi masyarakat pedesaan

400.13.47.2 Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan

400.13.48 Mekanisme Operasional lini lapangan

400.13.48.1 Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan

400.13.48.2 Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan

400.13.49 Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan

400.13.49.1 Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan

400.13.49.2 Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan

400.13.50 Pengumpulan dan pengolahan data

400.13.51 Analisis dan evaluasi

400.13.51.1 Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk

400.13.51.2 Analisis dan evaluasi keluarga berencanadan keluarga sejahtera

400.13.52 Sistem aplikasi dan bank data

400.13.52.1 Pengembangan sistem aplikasi

400.13.52.2 Pengelolaan bank data

400.13.53 Infrastruktur teknologi informasi

400.13.53.1 Pengembangan infrastruktur teknologi informasi

400.13.53.2 Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi

400.13.54 Dokumentasi dan penyebarluasan informasi

400.13.54.1Dokumentasi dan perpustakaan

400.13.54.2Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi

400.14 HUBUNGAN MASYARAKAT

400.14.1 Keprotokolan

400.14.1.1 Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)

400.14.1.2 Buku tamu Keprotokolan

400.14.1.3 Agenda kegiatan pimpinan daerah

400.14.1.4 Kunjungan dinas dalam dan luar negeri

400.14.2 Daftar nama/alamat kantor /pejabat

400.14.3 Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing- masing, dalam berbagai media: kertas, foto/ video/ rekaman suara/ multi media

400.14.4 Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan

400.14.4.1 Kliping koran

400.14.4.2 Brosur /Leaflet/poster /plakat

400.14.4.3 Pengumuman /pemberitaan

400.14.5 Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah

400.14.5.1 Hubungan antar lembaga pemerintah

400.14.5.2 Hubungan dengan organisasi sosial / LSM

400.14.5.3 Hubungan dengan perusahaan

400.14.5.4 Hubungan dengan Perguruan Tinggi/ sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/ Praktek Kerja Lapang(PKL)

400.14.5.5 Forum Kehumasan

400.14.5.6 Hubungan dengan Media Massa

400.14.6 Dengar pendapat/hearing DPRD
400.14.7 Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten
400.14.8 Penerbitan Majalah, buletin, koran dan jurnal
400.14.9 Publikasi melalui media cetak maupun elektronik
400.14.10 Pameran /sayembara/lomba/festival, pembuatan spanduk dan iklan
400.14.11 Penghargaan/tanda kenang-kenangan
400.14.12 Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa,Permohonan Maaf

500 PEREKONOMIAN

500.1 KETAHANAN PANGAN

500.1.1 Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yangdilakukan Pemerintah Daerah

500.1.2 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

500.1.2.1 Ketersediaan Pangan

500.1.2.2 Akses Pangan

500.1.2.3 Kerawanan Pangan

500.1.3 Distribusi dan Cadangan Pangan

500.1.3.1 Distribusi Pangan

500.1.3.2 Harga Pangan

500.1.3.3 Cadangan Pangan

500.1.4 Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan

500.1.4.1 Konsumsi Pangan

500.1.4.2 Penganekaragaman Pangan

500.1.4.3 Keamanan Pangan Segar

500.1.5 Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan

500.1.5.1 Dewan Ketahanan Pangan

500.1.5.2 Penghargaan Ketahan Pangan

500.1.6 Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)

500.1.7 Bimbingan Teknis

500.1.8 Evaluasi

500.2 PERDAGANGAN

500.2.1 Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.2.2 Perdagangan Dalam Negeri

500.2.2.1 Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha

500.2.2.2 Bina Usaha Jasa Perdagangan

500.2.2.3 Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan

	500.2.2.4	Informasi Perusahaan
	500.2.2.5	Pelaku Pasar
	500.2.2.6	Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah
	500.2.2.7	Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah
	500.2.2.8	Pengembangan Produk Lokal
	500.2.2.9	Pencitraan Produk Dalam Negeri
	500.2.2.10	Pengembangan Sarana Distribusi
	500.2.2.11	Pengelolaan Sarana Distribusi
	500.2.2.12	Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik
	500.2.2.13	Informasi dan Bimbingan TeknisPenyedia Jasa Logistik
	500.2.2.14	Informasi Pasar
	500.2.2.15	Informasi Hasil Industri
	500.2.2.16	Barang Strategis
	500.2.2.17	Bahan Pokok Agro
500.2.3	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
	500.2.3.1	Kelembagaan dan informasi standar
	500.2.3.2	Kerjasama Standarisasi
	500.2.3.3	Perumusan dan penerapan standar
	500.2.3.4	Tata usaha
	500.2.3.5	Kerjasama, informasi, dan publikasi
	500.2.3.6	Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen
	500.2.3.7	Bimbingan konsumen dan pelaku usaha
	500.2.3.8	Fasilitas kelembagaan
	500.2.3.9	Produk pertambangan dan anekaindustri
	500.2.3.10	Produk pertanian, kimia dan kehutanan
	500.2.3.11	Jasa
	500.2.3.12	Kerjasama
	500.2.3.13	Sarana dan Kerjasama
	500.2.3.14	Kelembagaan dan dan penilaian
	500.2.3.15	UTTP dan Standar Ukuran

500.2.3.16 Pengawasan
500.2.3.17 Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
500.2.3.18 Balai Pengujian UTTP

500.2.4 Perdagangan Berjangka Komoditi
500.2.4.1 Pengkajian pasar
500.2.4.2 Pengawasan Transaksi
500.2.4.3 Pengawasan Keuangan dan Audit
500.2.4.4 Pengkajian pasar
500.2.4.5 Pengembangan Pasar
500.2.4.6 Sistem informasi
500.2.4.7 Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang
500.2.4.8 Pengawasan pasar lelang
500.2.4.9 Pengawasan sistem gudang

500.2.5 Bimbingan Teknis
500.2.6 Evaluasi

500.3 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
500.3.1 Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.3.2 Kelembagaan Koperasi dan UKM
500.3.2.1 Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
500.3.2.2 Tata Laksana Koperasi dan UKM
500.3.2.3 Keanggotaan Koperasi
500.3.2.4 Pengendalian dan Akuntabilitas
500.3.3 Produksi
500.3.3.1 Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
500.3.3.2 Kehutanan dan Perkebunan
500.3.3.3 Perikanan dan Peternakan
500.3.3.4 Industri Kerajinan dan Pertambangan
500.3.3.5 Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
500.3.4 Pembiayaan
500.3.4.1 Program Pendanaan
500.3.4.2 Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
500.3.4.3 Urusan Permodalan
500.3.4.4 Asuransi dan Jasa Keuangan

500.3.4.5 Pembiayaan dan Penjaminan Kredit
500.3.4.6 Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)
500.3.5 Pemasaran dan Jaringan Usaha
500.3.5.1 Perdagangan Dalam Negeri
500.3.5.2 Ekspor dan Impor
500.3.5.3 Sarana dan Prasarana Pemasaran
500.3.5.4 Kemitraan dan Jaringan Usaha
500.3.5.5 Informasi dan Publikasi Bisnis
500.3.5.6 Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM
500.3.6 Pengembangan Sumber Daya Manusia
500.3.6.1 Pengembangan Kewirausahaan
500.3.6.2 Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM
500.3.6.3 Peran Serta Masyarakat
500.3.6.4 Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM
500.3.6.5 Advokasi
500.3.7 Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
500.3.7.1 Produktifitas dan Mutu
500.3.7.2 Restrukturisasi Usaha
500.3.7.3 Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)
500.3.7.4 Fasilitasi Investasi UKMK
500.3.7.5 Pengembangan Sarana Bisnis
500.3.8 Pengkajian Sumber Daya UKMK
500.3.8.1 Penelitian Koperasi
500.3.8.2 Penelitian UKM
500.3.8.3 Penelitian Sumber Daya
500.3.8.4 Pengembangan Perkaderan UMK
500.3.9 Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga
500.3.10 Pedagang Kaki Lima (PKL)
500.3.10.1 Peraturan Perundang-Undangan
500.3.10.2 Sarana dan Prasarana
500.3.11 Monitoring dan Evaluasi

500.4 KEHUTANAN
500.4.1 Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.4.2 Penyuluhan

500.4.2.1 Program Kerja Penyuluhan
500.4.2.2 Materi Penyuluhan
500.4.2.3 Program Penyuluhan
500.4.2.4 Sarana Penyuluhan
500.4.2.5 Pengembangan Tenaga Penyuluhan
500.4.2.6 Pelaksanaan Penyuluhan
500.4.2.7 Pemberdayaan Masyarakat
500.4.2.8 Deseminasi
500.4.2.9 Evaluasi, dan Laporan

500.4.3 Planologi Kehutanan
500.4.3.1 Perencanaan Makro Kawasan Hutan
500.4.3.2 Penataan Ruang Kawasan Hutan
500.4.3.3 Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan
500.4.3.4 Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan
500.4.3.5 Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
500.4.3.6 Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan
500.4.3.7 Inventarisasi Sumber Daya Hutan
500.4.3.8 Pemantauan Sumber Daya Hutan
500.4.3.9 Pemetaan Sumber Daya Hutan
500.4.3.10 Jaringan Data Spasial
500.4.3.11 Penggunaan Kawasan Hutan
500.4.3.12 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan
500.4.3.13 Informasi Penggunaan Kawasan Hutan
500.4.3.14 Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
500.4.3.15 Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan
500.4.3.16 Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan

500.4.4 Bina Usaha Kehutanan
500.4.4.1 Data areal HPH /HTI/IUPHHK
500.4.4.2 SK HPH/HTI/IUPHHK

500.4.4.3	Kerjasama
500.4.4.4	Pembatalan/Penolakan
500.4.4.5	Perpanjangan
500.4.4.6	Modal dan Peralatan
500.4.4.7	Investasi Industri
500.4.4.8	Peralatan
500.4.4.9	Tenaga Kerja
500.4.4.10	Pemegang Saham
500.4.4.11	Neraca Perusahaan
500.4.4.12	Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
500.4.4.13	Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)
500.4.4.14	Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)
500.4.4.15	Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)
500.4.4.16	Target Produksi RKT dan Beban Kerja
500.4.4.17	Produksi Kayu
500.4.4.18	Produksi non kayu
500.4.4.19	Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.20	Industri Kayu Non HPH/HTI/ IUPHHK
500.4.4.21	Industri Non Kayu
500.4.4.22	Hutan Tanaman Industri Pulp
500.4.4.23	Hutan Tanaman Industri Pertukangan
500.4.4.24	Pelanggaran dan Sanksi
500.4.4.25	Pemblokiran
500.4.4.26	Denda
500.4.4.27	Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.28	Pola Pemanfaatan Hutan Produksi
500.4.4.29	Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi
500.4.4.30	Informasi Sumber Daya Hutan Produksi
500.4.4.31	Pengembangan Investasi Usaha
500.4.4.32	Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam
500.4.4.33	Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja

		Usaha Produksi Hasil
	500.4.4.34	Produksi Hutan Alam
	500.4.4.35	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam
	500.4.4.36	Pengembangan Hutan Tanaman Industri
	500.4.4.37	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat
	500.4.4.38	Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi
	500.4.4.39	Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
	500.4.4.40	Pembiayaan Hutan Tanaman
	500.4.4.41	Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan
	500.4.4.42	Peredaran Hasil Hutan
	500.4.4.43	Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
	500.4.4.44	Penertiban Peredaran Hasil Hutan
	500.4.4.45	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.4.46	Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan
	500.4.4.47	Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.4.48	Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.49	Pembinaan TPTI/ TPTJ/ Silvikultur
500.4.5		Standardisasi dan Lingkungan
	500.4.5.1	Standardisasi
	500.4.5.2	Sarana Pengujian Hasil Hutan
	500.4.5.3	Pengembangan
	500.4.5.4	Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.5.5	Pengendalian Lingkungan
	500.4.5.6	Angkutan Hasil Hutan
	500.4.5.7	Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.8	Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.9	Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.10	Pass Angkutan Hasil Hutan

500.4.5.11 Sertifikat Ekspor Hasil Hutan

500.4.6 Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

- 500.4.6.1 Flora dan Fauna yang Dilindungi
- 500.4.6.2 Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi
- 500.4.6.3 Lembaga Konservasi/Kebun Binatang
- 500.4.6.4 Konvensi Keanekaragaman Hayati
- 500.4.6.5 Kawasan Konservasi
- 500.4.6.6 Pengamanan Hutan
- 500.4.6.7 Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan
- 500.4.6.8 Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan
- 500.4.6.9 Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- 500.4.6.10 Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
- 500.4.6.11 Bina Cinta Alam
- 500.4.6.12 Kader Konservasi Sumber Daya Alam
- 500.4.6.13 Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA

500.4.7 Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial

- 500.4.7.1 Pengelolaan Benih
- 500.4.7.2 Kebun Benih
- 500.4.7.3 Tegakan Benih
- 500.4.7.4 Pengadaan Benih
- 500.4.7.5 Pengujian dan Penyimpanan Benih
- 500.4.7.6 Lalu Lintas Angkutan Benih
- 500.4.7.7 Pembibitan
- 500.4.7.8 Lalu Lintas Angkutan Benih
- 500.4.7.9 Pengembangan Usaha Perbenihan
- 500.4.7.10 Pengendalian Peredaran Benih
- 500.4.7.11 Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- 500.4.7.12 Tanaman Reboisasi
- 500.4.7.13 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
- 500.4.7.14 Perhutanan Sosial
- 500.4.7.15 Pengendalian Perladangan

500.4.8 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

500.4.8.1 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan

500.4.8.2 Monitoring dan Evaluasi Penelitian

500.4.8.3 Diseminasi

500.4.8.4 Gelar Teknologi

500.4.8.5 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan

500.5 KELAUTAN DAN PERIKANAN

500.5.1 Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.5.2 Perikanan Tangkap

500.5.2.1 Data dan Statistik Perikanan Tangkap

500.5.2.2 Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan

500.5.2.3 Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan

500.5.2.4 Pendaftaran Kapal Perikanan

500.5.2.5 Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan

500.5.2.6 Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

500.5.2.7 Alokasi Usaha Penangkapan Ikan

500.5.2.8 Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan

500.5.2.9 Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan

500.5.2.10 Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan

500.5.2.11 Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan

500.5.2.12 Kelembgaan Usaha Penangkapan

500.5.2.13 Investasi dan Permodalan Usaha

500.5.2.14 Kenelayanan

500.5.2.15 Pembinaan Pengelolaan Usaha

500.5.2.16 Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan

500.5.3 Perikanan Budidaya

- 500.5.3.1 Potensi Lahan dan Air
- 500.5.3.2 Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar
- 500.5.3.3 Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar
- 500.5.3.4 Perbenihan Skala Kecil
- 500.5.3.5 Informasi dan Distribusi Pembenihan
- 500.5.3.6 Budidaya Air Tawar
- 500.5.3.7 Budidaya Ikan Hias
- 500.5.3.8 Sertifikasi Budidaya Perikanan
- 500.5.3.9 Data dan Statistik Perikanan Budidaya
- 500.5.3.10 Hama dan Penyakit Ikan
- 500.5.3.11 Perlindungan Lingkungan Budidaya
- 500.5.3.12 Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya
- 500.5.3.13 Kewirausahaan Budidaya
- 500.5.3.14 Pelayanan Usaha Budidaya
- 500.5.3.15 Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan
- 500.5.3.16 Promosi Usaha dan Budaya

500.5.4 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

- 500.5.4.1 Standarisasi Pengolahan Hasil
- 500.5.4.2 Pengembangan Produk
- 500.5.4.3 Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- 500.5.4.4 Industri Pengolahan
- 500.5.4.5 Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil
- 500.5.4.6 Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi
- 500.5.4.7 Promosi dan Jaringan Ikan Hias
- 500.5.4.8 Pengembangan Industri
- 500.5.4.9 Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi
- 500.5.4.10 Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri
- 500.5.4.11 Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri

	500.5.4.12	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.13	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.14	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.15	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.16	Pengembangan Ekspor
	500.5.4.17	Pengembangan Impor
	500.5.4.18	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.19	Pelayanan Usaha
	500.5.4.20	Kemitraan Usaha
	500.5.4.21	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran
	500.5.4.22	Investasi dan Permodalan
	500.5.4.23	Informasi dan Promosi
500.5.5	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	
	500.5.5.1	Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi
	500.5.5.2	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I
	500.5.5.3	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II
	500.5.5.4	Informasi dan Evaluasi Spasial
	500.5.5.5	Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi
	500.5.5.6	Konservasi Wawasan
	500.5.5.7	Konservasi Jenis Ikan
	500.5.5.8	Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan
	500.5.5.9	Mitigasi Bencana Lingkungan
	500.5.5.10	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan
	500.5.5.11	Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut
	500.5.5.12	Rehabilitasi dan Reklamasi
	500.5.5.13	Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.14	Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.15	Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.16	Sarana dan Prasarana Pulau-

Pulau Terkecil

500.5.5.17 Akses Permodalan

500.5.5.18 Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

500.5.5.19 Sosial Budaya Masyarakat

500.5.5.20 Pengembangan Usaha

500.5.6 Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

500.5.6.1 Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat

500.5.6.2 Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur

500.5.6.3 Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran

500.5.6.4 Pengawasan Usaha Budidaya

500.5.6.5 Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi

500.5.6.6 Pengawasan Pencemaran Perairan

500.5.6.7 Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil

500.5.6.8 Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya NonHayati

500.5.6.9 Logistik dan Operasional Wilayah Barat

500.5.6.10 Logistik dan Operasional Wilayah Timur

500.5.6.11 Perawatan Kapal Pengawas

500.5.6.12 Pengawakan Kapal Pengawas

500.5.6.13 Sistem Pemantauan

500.5.6.14 Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan

500.5.6.15 Pemantauan Sumber Daya Perikanan

500.5.6.16 Pengembangan Infrastruktur Pengawasan

500.5.6.17 Penyidikan

500.5.6.18 Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal

500.5.6.19 Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan

500.5.6.20 Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran

500.5.7 Karantina Ikan

- 500.5.7.1 Pemeriksaan Ikan
- 500.5.7.2 Penahanan
- 500.5.7.3 Pengasingan
- 500.5.7.4 Pengamatan
- 500.5.7.5 Pengakuan
- 500.5.7.6 Penolakan
- 500.5.7.7 Pemusnahan
- 500.5.7.8 Persyaratan lalu Lintas Pemasukan
- 500.5.7.9 Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran
- 500.5.7.10 Permohonan Sertifikat
- 500.5.7.11 Pemasukan Formulir
- 500.5.7.12 Pemasukan Sertifikat
- 500.5.7.13 Evaluasi dan Monitoring Sertifikat
- 500.5.7.14 Surat Perintah
- 500.5.7.15 Rekomendasi
- 500.5.7.16 Penutupan Suatu Area
- 500.5.7.17 Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
- 500.5.7.18 Pengawasan Peraturan Perkarantinaan
- 500.5.7.19 Pengawasan Pelaksanaan Operasional
- 500.5.7.20 Instalasi Karantina Sementara
- 500.5.7.21 Lokasi Karantina

500.6 PERTANIAN

- 500.6.1 Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.6.2 Perlindungan hortikultura
  - 500.6.2.1 Perlindungan Tanaman Buah
  - 500.6.2.2 Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
  - 500.6.2.3 Perlindungan Tanaman Florikultura
  - 500.6.2.4 Dampak iklim dan Persyaratan Teknis
- 500.6.3 Perbenihan Hortikultura
  - 500.6.3.1 Penilaian Varietas
  - 500.6.3.2 Pengawasan Mutu Benih
  - 500.6.3.3 Budidaya dan Pascapanen Folrikultura
- 500.6.4 Perluasan dan Pengelolaan Lahan
  - 500.6.4.1 Basis Data Lahan

500.6.4.2 Pengendalian Lahan
500.6.4.3 Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahanan
500.6.4.4 Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
500.6.4.5 Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan

500.6.5 Pengelolaan Air Irigasi
500.6.5.1 Pengembangan Sumber Air
500.6.5.2 Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air
500.6.5.3 Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
500.6.5.4 Kelembagaan

500.6.6 Pembiayaan Pertanian
500.6.6.1 Pembiayaan Program
500.6.6.2 Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
500.6.6.3 Pembiayaan agribisnis
500.6.6.4 Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis

500.6.7 Pupuk Pestisida
500.6.7.1 Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
500.6.7.2 Pupuk Anorganik
500.6.7.3 Pestisida
500.6.7.4 Pengawasan Pupuk dan Pestisida

500.6.8 Alat dan Mesin Pertanian
500.6.8.1 Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
500.6.8.2 Pengawasan dan Peredaran Alatdan Mesin Pertanian
500.6.8.3 Kelembagaan dan Pelayanan Alatdan Mesin Pertanian

500.6.9 Perbenihan Tanaman Pangan
500.6.9.1 Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
500.6.9.2 Produksi Benih Serealia
500.6.9.3 Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
500.6.9.4 Kelembagaan Benih

500.6.10 Budidaya Serealia
500.6.10.1 Padi Irigasi dan Rawa
500.6.10.2 Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering

500.6.10.3 Jagung
500.6.10.4 Serealia Lain
500.6.11 Budidaya Aneka Kacang dan Umbi
500.6.11.1 Kedelai
500.6.11.2 Ubi Kayu
500.6.11.3 Aneka Kacang
500.6.11.4 Aneka Umbi
500.6.12 Tanaman Pangan
500.6.12.1 Pengeloalan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan
500.6.12.2 Dampak Perubahan Iklim
500.6.12.3 Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
500.6.12.4 Pengelolaan Pengendalian HamaTerpadu
500.6.13 Pascapanen Tanaman Pangan
500.6.13.1 Padi
500.6.13.2 Jagung dan Serealia alin
500.6.13.3 Kedelai dan Aneka Kacang
500.6.13.4 Aneka Umbi
500.6.14 Pengolahan Hasil Pertanian
500.6.14.1 Tanaman Pangan
500.6.14.2 Hortikultura
500.6.14.3 Perkebunan
500.6.14.4 Peternakan
500.6.15 Mutu dan Standariasi
500.6.15.1 Standardisasi
500.6.15.2 Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu
500.6.15.3 Akreditasi dan Kelembagaan
500.6.15.4 Kerjasama dan Harmonisasi
500.6.16 Pengembangan Usaha dan Investasi
500.6.16.1 Kemitraan dan Kewirausahaan
500.6.16.2 Investasi
500.6.16.3 Promosi Dalam Negeri
500.6.16.4 Promosi Luar Negeri
500.6.17 Pemasaran Domestik
500.6.17.1 Informasi Pasar
500.6.17.2 Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga
500.6.17.3 Sarana dan Kelembagaan Pasar
500.6.17.4 Jaringan Pemasaran

500.6.18 Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat

500.6.19 Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan

500.6.19.1 Hasil Penelitian dan Pengembangan

500.6.19.2 Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi

500.6.20 Diseminasi

500.6.21 Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian

500.6.21.1 Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop

500.6.21.2 Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Pubikasi lainnya

500.6.22 Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan

500.6.23 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan

500.6.24 Data Penelitian dan Pengembangan

500.6.25 Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan

500.6.26 Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

500.6.26.1 Hak Cipta

500.6.26.2 Hak Paten Sederhana

500.6.26.3 Hak Paten Biasa

500.6.26.4 Hak Merek

500.6.26.5 Pendaftaran Varietas Tanaman

500.6.26.6 Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan

500.6.26.7 Permohonan HKI yang ditolak

500.6.27 Pelayanan Perijinan Pertanian

500.6.27.1 Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)

500.6.27.2 Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)

500.6.27.3 Sarana III (bidang bibit, karkas, daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)

500.6.28 Pelayanan Hukum

500.6.28.1 Sertifikasi

500.6.28.2 Pertimbangan Hukum

500.6.29 Karantina Pertanian

500.6.29.1 Karantina Tumbuhan

500.6.29.2 Karantina Hewan

500.6.30 Bimbingan Teknis

500.6.31 Evaluasi

500.7 PETERNAKAN

500.7.1 Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.7.2 Peternakan dan Kesehatan Hewan

500.7.2.1 Perbibitan Ternak, Antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran

500.7.2.2 Pakan Ternak

500.7.2.3 Budidaya Ternak

500.7.2.4 Kesehatan Hewan, Antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan

500.7.2.5 Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, Antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat

Rekomendasi & Persetjuan Pemasukan/ Pengeluaran

500.7.3 Bimbingan Teknis

500.7.4 Evaluasi

500.8 PERKEBUNAN

500.8.1 Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.8.2 Tanaman Semusim

500.8.2.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim

500.8.2.2 Perbenihan Tanaman Semusim

500.8.2.3 Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim

500.8.2.4 Pemberdayaan Tanaman Semusim

500.8.3 Tanaman Rempah & Penyegar

500.8.3.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar

500.8.3.2 Perbenihan Tanaman Rempah &Penyegar

500.8.3.3 Budidaya Tanaman Rempah &Penyegar

500.8.3.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar

500.8.4 Tanaman Tahunan

500.8.4.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan

500.8.4.2 Perbenihan Tanaman Tahunan

500.8.4.3 Budidaya Tanaman Tahunan

500.8.4.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan

500.8.5 Perlindungan Perkebunan

500.8.5.1 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan

500.8.5.2 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar

500.8.5.3 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan

500.8.5.4 Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran

500.8.6 Pascapanen dan Pembinaan Usaha

500.8.6.1 Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar

500.8.6.2 Pascapanen Tanaman Tahunan

500.8.6.3 Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan

500.8.6.4 Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik

500.8.7 Bimbingan Teknis Perkebunan

500.8.8 Evaluasi Perkebunan

500.9 PERINDUSTRIAN

500.9.1 Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.9.2 Iklim Usaha dan Kerja Sama

500.9.2.1 Industri Manufaktur

500.9.2.2 Industri Agro

500.9.2.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

500.9.2.4 Industri Kecil dan Menengah

500.9.3 Promosi Industri

500.9.3.1 Industri Manufaktur

500.9.3.2 Promosi Industri Agro

500.9.3.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

500.9.3.4 Industri Kecil dan Menengah

500.9.4 Standarisasi dan Teknologi

500.9.4.1 Industri Manufaktur

500.9.4.2 Industri Agro

500.9.4.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

500.9.4.4 Industri Kecil dan Menengah

500.9.5 Hak dan Kekayaan Intelektual
- 500.9.5.1 Industri Manufaktur
- 500.9.5.2 Industri Agro
- 500.9.5.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
- 500.9.5.4 Industri Kecil dan Menengah

500.9.6 Industri Hijau
- 500.9.6.1 Industri Manufaktur
- 500.9.6.2 Industri Agro
- 500.9.6.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
- 500.9.6.4 Industri Kecil dan Menengah

500.9.7 Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota

500.9.8 Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

500.9.9 Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri

500.9.10 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri

500.9.11 Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional

500.9.12 Standarisasi
- 500.9.12.1 Standar
- 500.9.12.2 Penyiapan Penerapan
- 500.9.12.3 Infrastruktur Standar

500.9.13 Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
- 500.9.13.1 Kebijakan Industri
- 500.9.13.2 Perpajakan dan Tarif
- 500.9.13.3 Pengembangan Model Industrial

500.9.14 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
- 500.9.14.1 Industri Hijau
- 500.9.14.2 Lingkungan Hidup
- 500.9.14.3 Energi

500.9.15 Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
- 500.9.15.1 Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri
- 500.9.15.2 Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
- 500.9.15.3 Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual

500.9.16 Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri

500.10 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

500.10.1 Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah daerah

500.10.2 Rekomendasi Kegeologian

500.10.2.1 Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah

500.10.2.2 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan

500.10.2.3 Pertambangan

500.10.2.4 Panas Bumi

500.10.2.5 Geosains

500.10.2.6 Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)

500.10.2.7 Kelayakan Lingkungan

500.10.3 Penelitian Kegeologian

500.10.3.1 Administrasi pelaksanaan Penelitian

500.10.3.2 Administrasi tenaga penelitian

500.10.3.3 Administrasi penggunaan peralatan penelitian

500.10.3.4 Log-book peralatan survei/ peralatan uji/kalibrasi

500.10.3.5 Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian

500.10.3.6 Sumber Daya Geologi

500.10.3.7 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan

500.10.3.8 Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

500.10.3.9 Survei Geologi

500.10.4 Inventarisasi dan evaluasi kegeologian

500.10.4.1 Sumber Daya Geologi

500.10.4.2 Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

500.10.4.3 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan

500.10.4.4 Survei Geologi

500.10.4.5 Konservasi

500.10.5 Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi

500.10.5.1 Peta potensi dan sebaran

500.10.5.2 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan

	500.10.5.3	Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara
	500.10.5.4	Survei Geologi
500.10.6	Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.6.1	Rencana Induk Jaringan Gas Bumi
	500.10.6.2	Rencana dan Realisasi Investasi
	500.10.6.3	Penetapan Harga Minyak Mentah
	500.10.6.4	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi
	500.10.6.5	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
	500.10.6.6	Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	500.10.6.7	Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri
	500.10.6.8	Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)
500.10.7	Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.7.1	Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)
	500.10.7.2	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi penyisihan

Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan)

500.10.7.3 Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksploitasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyakdan Gas Bumi)

500.10.7.4 Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)

500.10.7.5 Perpanjangan Kontrak KKS

500.10.7.6 Penetapan Alokasi dan Harga Gas

500.10.7.7 Partisipasi Interest

500.10.7.8 Tumpang Tindih Lahan Usaha Hilir Minyak dan Gas

500.10.8 Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

500.10.8.1 Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain, Antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/ rekomendasi/penandasahan), Pengawasan

	500.10.8.2	Fasilitasi dan pertimbangan Pelanggaran
	500.10.8.3	Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
500.10.9	Teknik dan Lingkungan	
	500.10.9.1	Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
	500.10.9.2	Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), Antara lain : Berkas permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT
	500.10.9.3	Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)
	500.10.9.4	Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las
	500.10.9.5	Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi
	500.10.9.6	Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi
	500.10.9.7	Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
	500.10.9.8	Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir, Antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/ Pengesahan

penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi

500.10.9.9 Penghargaan Keselamatan Kerja, Antara lain: urat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi

500.10.9.10 Usaha penunjang

500.10.10 Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

500.10.10.1 Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

500.10.10.2 Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

500.10.10.3 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

500.10.10.4 Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastuktur Minyak dan Gas Bumi

500.10.11 Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi

500.10.11.1 Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi

500.10.11.2 Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga

500.10.11.3 Penyiapan Program Pemanfaatan Energi

500.10.11.4 Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT

500.10.11.5 Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT

500.10.11.6 Penyusunan Neraca Energi

500.10.11.7 Road Map di Bidang EBT

500.10.12 Panas Bumi

500.10.12.1 Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

500.10.12.2 Sertifikasi Kelayakan

		Penggunaan Instalasi (SKPI)
	500.10.12.3	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan
	500.10.12.4	Rekomendasi Bahan Peledak
	500.10.12.5	Perizinan penggunaan gudang bahan peledak
	500.10.12.6	Izin Tangki Bahan Bakar Cair
	500.10.12.7	Persetujuan sertifikasi *Welding Prosedure Specifikation (WPS) dan Prosedure Qualification Record (PQR)* dan kualifikasi Juru Las *Qualification Record (PQR)* dan kualifikasi Juru Las
	500.10.12.8	Penerbitan Izin Usaha Panas Bumi (IUP)
	500.10.12.9	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)
	500.10.12.10	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)
	500.10.12.11	Penetapan kapasitas usaha panas bumi
	500.10.12.12	Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
	500.10.12.13	Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi
	500.10.12.14	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi
	500.10.12.15	Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi
	500.10.12.16	Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi
	500.10.12.17	Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi
500.10.13	Bioenergi	
	500.10.13.1	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)
	500.10.13.2	Pengadaan Bahan Bakar

		Nabati (BNN)
	500.10.13.3	Penerbitan Rekomendasi Ekspor – Impor
	500.10.13.4	Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)
	500.10.13.5	Evaluasi/Revisi HIP BBN
	500.10.13.6	Database Pengusahaan Bionergi
	500.10.13.7	Penetapan Badan Usaha sebagai Biomassar atau Biogas untuk Pembangkit Listrik
	500.10.13.8	Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati
	500.10.13.9	Ususl Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga
500.10.14	Aneka Energi	
	500.10.14.1	Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi
	500.10.14.2	Penetapan Kapasitas Usaha
	500.10.14.3	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
	500.10.14.4	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
	500.10.14.5	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)
500.10.15	Konservasi Energi	
	500.10.15.1	Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi
	500.10.15.2	Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi
	500.10.15.3	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajamen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE
	500.10.15.4	Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast
	500.10.15.5	Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi
	500.10.15.6	Penyusunan emisi energi gas rumah kaca
	500.10.15.7	Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi
	500.10.15.8	Profil investasi efisiensi energi

	500.10.15.7	*Invesment Grade Audit (IGA)*
	500.10.15.8	Bimbingan Teknis Bidang EBTKE
500.10.16	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE	
	500.10.16.1	Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga
	500.10.16.2	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan GasBumi
	500.10.16.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE
	500.10.16.4	Evaluasi Program Kerja
500.10.17	Bina Program Tenaga Listrik	
	500.10.17.1	Investasi dan pendanaan tenaga listrik, Antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik
	500.10.17.2	Pengembangan listrik pedesaan, Antara lain: Data program listrik perdesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik perdesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu
	500.10.17.3	Data dan Informasi Ketenagalistrikan
500.10.18	Bina Usaha Ketenagalistikan	
	500.10.18.1	Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, Antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL),

		Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data laporan berkala pemegang Izin
	500.10.18.2	Harga dan Subsidi Listrik
	500.10.18.3	Hubungan komersial tenaga Listrik
	500.10.18.4	Perlindungan konsumen listrik, Antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero)
500.10.19	Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	
	500.10.19.1	Kelaikan teknik dan keselamatan ketenaga listrikan
	500.10.19.2	Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan
	500.10.19.3	Usaha penunjang ketenagalistrikan, Antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)
	500.10.19.4	Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan, Antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan, Laporan

		pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan faktor emisi *Clean Development Mechansim (CDM)*
500.10.20	Sertifikasi	
	500.10.20.1	Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
	500.10.20.2	Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)
	500.10.20.3	Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik
	500.10.20.4	Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik
	500.10.20.5	Registrasi Sertifikasi
500.10.21	Akreditasi Ketenagalistrikan	
500.10.22	Standarisasi Kompetensi	
500.10.23	Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan	
	500.10.23.1	Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.2	Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.3	Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.4	Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
500.10.24	Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan	
	500.10.24.1	Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
	500.10.24.2	Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
	500.10.24.3	Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)
	500.10.24.4	Laporan berkala pemegang penunjukan LIT

	500.10.24.5	Laporan hasil pengawasan penunjukan
500.10.25	Bina Program Mineral dan Batubara	
	500.10.25.1	Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara
	500.10.25.2	Rencana Induk Mineral dan Batubara
	500.10.25.3	Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara
	500.10.25.4	Data dan Informasai Mineral dan Batubara
	500.10.25.5	Pelaporan Program Mineral dan Batubara
	500.10.25.6	Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler
	500.10.25.7	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara
	500.10.25.8	Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara
	500.10.25.9	Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara
500.10.26	Pembinaan Pengusahaan Mineral	
	500.10.26.1	Ketenagakerjaan
	500.10.26.2	Pemberdayaan masyarakat
	500.10.26.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral
	500.10.26.6	Pengawasan produksi dan Pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)
	500.10.26.7	Perizinan usaha Pertambangan mineral
	500.10.26.8	Kontrak Karya (KK) 5

	500.10.26.9	Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
	500.10.26.11	Persetujuan perubahan Saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral
	500.10.26.12	Teguran kepada pengusaha Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.13	Tanggapan kepada Pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral
	500.10.26.14	Pedoman/petunjuk teknis Pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
	500.10.26.15	Pelaporan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.16	Penghargaan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.17	Penerbitan sertifikat *clear and Clean (CnC)* Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral
500.10.27	Pembinaan Pengusahaan Batubara	
	500.10.27.1	Ketenagakerjaan
	500.10.27.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
	500.10.27.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara
	500.10.27.6	Pengawasan produksi dan Pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut), Antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B, IUP hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara

	500.10.27.7	Perizinan Usaha Pertambangan Batubara
	500.10.27.8	Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
	500.10.27.9	Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B), Antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist)
	500.10.27.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
	500.10.27.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
	500.10.27.12	Teguran kepada pengusaha Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
	500.10.27.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara
	500.10.27.14	Pedoman/petunjuk teknis Pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
	500.10.27.15	Pelaporan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.16	Penghargaan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.17	Penerbitan sertifikat *clear and Clean (CnC)* Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara
500.10.28	Penerimaan Negara	
	500.10.28.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak
	500.10.28.2	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
	500.10.28.3	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
500.10.29	Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	

500.10.29.1	Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), Antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional
500.10.29.2	Pengawasan Standardisasi
500.10.29.3	Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala TeknikTambang
500.10.29.4	Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja, Antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
500.10.29.5	Pemeriksaan teknis dan Pengujian instalasi dan peralatan tambang, Antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan
500.10.29.6	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
500.10.29.7	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
500.10.29.8	Rekomendasi bahan kimia
500.10.29.9	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang
500.10.29.10	Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan, Antara lain: Laporan Bulanan

	500.10.29.10	Terjadinya Pencemaran (LPL5) pelaksanaan reklamasi
	500.10.29.11	Pemberian Penghargaan, Antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselematan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan
	500.10.29.12	Pengawasan lingkungan pertambangan
	500.10.29.13	Usaha Jasa Mineral dan Batubara
	500.10.29.14	Pembinaan dan pengawasan Usaha jasa mineral dan batubara
	500.10.29.15	Rekomendasi Teknis, Antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi
	500.10.29.16	Persetujuan Teknis, Antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi
	500.10.29.17	Pengawasan Teknis
	500.10.29.18	Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara
	500.10.29.19	Pembinaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis
500.10.30	Program Penelitian dan Pengembangan	
	500.10.30.1	Rencana Penelitian dan Pengembangan
	500.10.30.2	Pengembangan dan inovasi
	500.10.30.3	Dokumen penerapan/ pemanfaatan/pendayagunaan / replikasi / prototipe hasil penelitian/pengkajian /pengembangan / inovasi
	500.10.30.4	Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi

	500.10.30.5	Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.6	Pembinaan penelitian/Pengembangan, Pengembangan pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahunan dan teknologi
	500.10.30.7	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.8	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.9	Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.10	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI).
	500.10.30.11	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.12	Layanan Jasa Penelitian, Pengembangan dan penerapan IPTEK
	500.10.30.13	Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral
500.10.31	Sarana Litbang	
	500.10.31.1	Administrasi penggunaan peralatan
	500.10.31.2	Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi
500.10.32	Afiliasi	
	500.10.32.1	Proyek Percontohan
	500.10.32.2	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi
	500.10.32.3	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan
	500.10.32.4	Penyajian Informasi
500.10.33	Penelitian dan Pengembangan Kegeologian	
	500.10.33.1	Pemetaaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan
	500.10.33.2	Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian

Energi dan kewilayahan pantai

500.10.33.3 Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan

500.10.33.4 Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan

500.10.34 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi

500.10.34.1 Teknologi Eksplorasi

500.10.34.2 Teknologi Eksploitasi

500.10.34.3 Laboratorium

500.10.34.4 Study

500.10.34.5 Teknologi Proses

500.10.34.6 Teknologi Aplikasi Produk

500.10.34.7 Teknologi Gas

500.10.35 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara

500.10.35.1 Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya

500.10.35.2 Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral

500.10.35.3 Teknologi Pemanfaatan Batubara

500.10.36 Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan

500.10.36.1 Energi baru terbarukan

500.10.36.2 Teknologi Ketenagalistrikan

500.10.36.3 Lingkungan dan Konservasi Energi

500.10.36.4 Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi

500.11 PERHUBUNGAN

500.11.1 Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.11.2 Jaringan Prasarana dan Pelayanan

500.11.2.1 Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang

500.11.2.2 Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C

500.11.2.3 Penetapan lokasi terminal

barangutama

500.11.2.4 Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal

500.11.2.5 Jaringan trayek angkutan antarkota/provinsi

500.11.2.6 Jaringan lintas pada jaringan jalan primer

500.11.2.7 Penetapan kelas jalan primer

500.11.2.8 Kualifikasi teknis petugas terminal

500.11.2.9 Jaringan transportasi jalan sekunder

500.11.3 Pengembangan Transportasi Jalan

500.11.3.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan

500.11.3.2 Pengembangan transportasi jalan

500.11.4 Pengujian Kendaraan Bermotor

500.11.4.1 Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor

500.11.4.2 Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor

500.11.4.3 Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor

500.11.4.4 Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor

500.11.5 Teknologi Kendaraan Bermotor

500.11.5.1 Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor

500.11.5.2 Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor

500.11.5.3 Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor

500.11.5.4 Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor

500.11.6 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

500.11.6.1 Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan

500.11.6.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional

500.11.7 Perlengkapan Jalan

500.11.7.1 Pedoman teknis perlengkapan

		jalan
	500.11.7.2	Penimbangan kendaraan bermotor di jalan
	500.11.7.3	Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor
	500.11.7.4	Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor
	500.11.7.5	Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional
500.11.8	Angkutan Penumpang	
	500.11.8.1	Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi
	500.11.8.2	Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara
	500.11.8.3	Izin trayek antar kota antar provinsi
	500.11.8.4	Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi
	500.11.8.5	Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum
	500.11.8.6	Pemberian subsidi angkutan umum
	500.11.8.7	Angkutan perintis
	500.11.8.8	Penghargaan perusahaan angkutan umum
500.11.9	Angkutan Barang	
	500.11.9.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
	500.11.9.2	Tarif angkutan barang
	500.11.9.3	Izin operasi angkutan barang tertentu
	500.11.9.4	Pembinaan angkutan barang
	500.11.9.5	Izin dispensasi angkutan jalan
500.11.10	Monitoring Operasional	
	500.11.10.1	Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	500.11.10.2	Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif

terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan

500.11.10.3 Berkas Pelanggaran Perda

500.11.11 Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil

500.11.11.1 Pedoman Teknis

500.11.11.2 Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

500.11.11.3 Bimtek PPNS

500.11.11.4 Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

500.11.12 Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.12.1 Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan

500.11.12.2 Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & Penyeberangan

500.11.13 Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.13.1 Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)

500.11.13.2 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.14 Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

500.11.15 Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

500.11.15.1 Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan

500.11.15.2 Pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau - danau dan penyeberangan

500.11.16 Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.16.1 Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.16.2 Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan

500.11.16.3 Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional

500.11.16.4 Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.17 Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.18 Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.18.1 Manajemen lalu lintas

500.11.18.2 Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan

500.11.18.3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau

500.11.18.4 Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau

500.11.19 Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.19.1 Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan

500.11.19.2 Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau

500.11.19.3 Perambuan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.20 Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.20.1 Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.20.2 Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan Internasional

500.11.21 Tarif dan Keperintisan

500.11.21.1 Perhitungan tarif,

pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.21.2 Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan

500.11.22 Bina Sistem Transportasi Perkotaan

500.11.22.1 Jaringan Transportasi Perkotaan

500.11.22.2 Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan Daratan

500.11.22.3 Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi

500.11.23 Lalu Lintas Perkotaan

500.11.23.1 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan

500.11.23.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan

500.11.23.3 Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah

500.11.24 Angkutan Perkotaan

500.11.24.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek

500.11.24.2 Jaringan trayek perkotaan

500.11.24.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi

500.11.25 Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan

500.11.25.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang

500.11.25.2 Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi

500.11.25.3 Penentuan dan pemenuhan

alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi

500.11.26 Dampak Transportasi Perkotaan

500.11.26.1 Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan

500.11.26.2 Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan

500.11.26.3 Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan

500.11.26.4 Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasionaldalam kawasan kota

500.11.26.5 Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan

500.11.26.6 Masterplan transportasi perkotaan

500.11.27 Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan

500.11.27.1 Monitoring dan data kecelakaan

500.11.27.2 Kualifikasi unit pengkajian

500.11.27.3 Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan

500.11.28 Pengembangan Keselamatan

500.11.28.1 Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan

500.11.28.2Harmonisasi kebijakan

500.11.29 Promosi dan Kemitraan Keselamatan

500.11.29.1 Promosi Keselamatan : Penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan

500.11.29.2 Kemitraan keselamatan antar Lembaga dan masyarakat di bidang

keselamatan lalu Lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan

500.11.30 Bina Keselamatan Angkutan Umum

500.11.30.1 Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum

500.11.30.2 Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau

500.11.31 Audit Keselamatan

500.11.31.1 Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia

500.11.31.2 Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.31.3 Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan

500.11.32 Inspeksi Keselamatan

500.11.32.1 Pedoman keselamatan

500.11.32.2 Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.32.3 Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan

500.11.33 Parkir

500.11.33.1 Surat Tugas Juru Parkir

500.11.33.2 Izin tempat khusus parkir swasta

500.11.33.3 Surat Tugas TKP Pemerintah

500.12 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

500.12.1 Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.12.2 Telekomunikasi

500.12.2.1 Layanan Jaringan Telekomunikasi

500.12.2.2 Layanan Jasa Telekomunikasi

500.12.2.3 Penomoran Telekomunikasi

dan Informatika

500.12.2.4 Kelayakan Sistem Telekomunikasi

500.12.3 Penyiaran

500.12.3.1 Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi

500.12.3.2 Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi

500.12.4 Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publikdan Kewajiban Universal

500.12.4.1 Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah

500.12.4.2 Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah

500.12.4.3 Layanan Khusus Penyiaran

500.12.4.4 Pelayanan Kewajiban Universal

500.12.4.5 Pengembangan Infrastruktur

500.12.5 Pengendalian Informatika

500.12.5.1 Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi

500.12.5.2 Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi

500.12.5.3 Monitoring dan Evaluasi Penyiaran

500.12.5.4 Pencegahan dan Penertiban

500.12.6 e- Goverment

500.12.6.1 Tata Kelola *e-Government*

500.12.6.2 Teknologi dan Infrastruktur *e-Government*

500.12.6.3 Interoperabilitas dan Interkonektivitas *e-Government*

500.12.6.4 Aplikasi Layanan Kepemerintahan

500.12.6.5 Aplikasi Layanan Publik

500.12.7 E- Business

500.12.7.1 Tata Kelola *e-Business*

500.12.7.2 Teknologi dan Infrastruktur e-*Business*

500.12.7.3 Interoperabilitas dan Interkonektivitas *e-Business*

500.12.7.4 Aplikasi Layanan *e-Business*

500.12.8 Pemberdayaan Informatika Masyarakat

500.12.8.1 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan

500.12.8.2 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan

500.12.9 Pemberdayaan Industri Informatika

	500.12.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika
	500.12.9.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna
	500.12.9.3	Industri Perangkat Lunak
	500.12.9.4	Industri Konten Multimedia
500.12.10	Keamanan Informasi	
	500.12.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi
	500.12.10.2	Teknologi Keamanan Informasi
	500.12.10.3	Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi
	500.12.10.3	Penyidikan dan Penindakan
	500.12.10.4	Budaya Keamanan Informasi
500.12.11	Komunikasi Publik	
	500.12.11.1	Tata Kelola Komunikasi Publik
	500.12.11.2	Pengelolaan Opini Publik
	500.12.11.3	Layanan Komunikasi Publik
500.12.12	Pengolahan dan Penyediaan Informasi	
	500.12.12.1	Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan
	500.12.12.2	Informasi Perekonomian
	500.12.12.3	Informasi Kesejahteraan Rakyat
500.12.13	Pengelolaan Media Publik	
	500.12.13.1	Media Cetak
	500.12.13.2	Media Online
	500.12.13.3	Media Luar Ruang dan Audio Visual
500.12.14	Kemitraan Komunikasi	
	500.12.14.1	Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
	500.12.14.2	Kemitraan Media dan Dunia Usaha
	500.12.14.3	Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi
500.12.15	Infrastruktur Informatika	
	500.12.15.1	Jaringan
	500.12.15.2	Piranti Teknologi Informatika
	500.12.15.3	Keamanan Informatika
500.12.16	Sistem dan Data	
	500.12.16.1	Portal dan Konten

500.12.16.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data

500.12.16.3 Pengembangan Aplikasi

500.12.17 Pusat Kerjasama

500.12.17.1 Kerja Sama daerah

500.12.17.2 Kerja Sama Bilateral

500.12.18 Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat

500.12.18.1 Pelayanan Informasi

500.12.18.2 Hubungan Masyarakat

500.12.18.3 Bimbingan Teknis

500.12.19 Evaluasi

500.13 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

500.13.1 Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.13.2 Pengembangan Destinasi Wisata

500.13.2.1 Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata

500.13.2.2 Pengembangan Daya Tarik Wisata

500.13.2.3 Industri Pariwisata

500.13.2.4 Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata

500.13.2.5 Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif,dan Event

500.13.3 Pemasaran Pariwisata

500.13.3.1 Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata

500.13.3.2 Promosi Pariwisata Luar Negeri

500.13.3.3 Promosi Pariwisata Dalam Negeri

500.13.3.4 Pencitraan Indonesia

500.13.4 Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya

500.13.4.1 Pengembangan industri Perfilman

500.13.4.2 Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik

500.13.4.3 Pengembangan Seni Rupa

500.13.5 Ekonomi Kreatif Berbasi Media, Desain, dan IPTEK

500.13.5.1 Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media

500.13.5.2 Desain dan Arsitektur

500.13.5.3 Kerjasama dan Fasilitasi

500.13.6 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

500.13.6.1 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan

500.13.6.2 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif

500.13.6.3 Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

500.13.6.4 Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

500.14 STATISTIK

500.14.1 Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.14.2 Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi

500.14.2.1 Perencanaan

500.14.2.2 Persiapan, Antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba

500.13.5 Ekonomi Kreatif Berbasi Media, Desain, dan IPTEK

500.13.5.1 Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media

500.13.5.2 Desain dan Arsitektur

500.13.5.3 Kerjasama dan Fasilitasi

500.13.6 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

500.13.6.1 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan

500.13.6.2 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif

500.13.6.3 Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

500.13.6.4 Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

500.14 STATISTIK

500.14.1 Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.14.2 Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi

500.14.2.1 Perencanaan

500.14.2.2 Persiapan, Antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan

	500.15.2.2	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
500.15.3	Pengembangan Standarisasi Kompetensi	
	500.15.3.1	Penerapan Standar Kompetensi
	500.15.3.2	Pengembangan Standarisasi Kompetensi
	500.15.3.3	Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan
	500.15.3.4	Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan
	500.15.3.5	Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian
500.15.4	Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja	
	500.15.4.1	Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan
	500.15.4.2	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan
	500.15.4.3	Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan
	500.15.4.4	Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga
500.15.5	Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan	
	500.15.5.1	Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
	500.15.5.2	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
	500.15.5.3	Tenaga Pelatihan
	500.15.5.4	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan
500.15.6	Bina Pemagangan	
	500.15.6.1	Pemagangan Dalam Negeri
	500.15.6.2	Pemagangan Luar Negeri
	500.15.6.3	Perizinan dan Advokasi Pemagangan
	500.15.6.4	Promosi dan Jenjang Pemagangan
500.15.7	Produktivitas dan Kewirausahaan	
	500.15.7.1	Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan
	500.15.7.2	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas
	500.15.7.3	Pengembangan Pengukuran

		dan Kajian Produktivitas
	500.15.7.4	Pengembangan Kewirausahaan
500.15.8	Pengembangan Pasar Kerja	
	500.15.8.1	Informasi Pasar Kerja
	500.15.8.2	Analisis Pasar Kerja
	500.15.8.3	Bursa Kerja
	500.15.8.4	Analisis Jabatan
500.15.9	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
	500.15.9.1	Antar Kerja
	500.15.9.2	Penempatan Tenaga Kerja Khusus
	500.15.9.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
	500.15.9.4	Pemberdayaan Pengantar Kerja
500.15.10	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal	
	500.15.10.1	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal
	500.15.10.2	Pengembangan Padat Karya
	500.15.10.3	Terapan Teknologi Tepat Guna
	500.15.10.4	Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga
500.15.11	Standardisasi Profesi	
	500.15.11.1	Sistem Informasi dan Registrasi
	500.15.11.2	Pembakuan Akreditasi
500.15.12	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi	
	500.15.12.1	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama
	500.15.12.2	Perjanjian Kerja
	500.15.12.3	Kesejahteraan Pekerja
	500.15.12.4	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja
500.15.13	Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial	
	500.15.13.1	Organisasi Pekerja dan Pengusaha
	500.15.13.2	Kelembagaan Hubungan Industrial
	500.15.13.3	Pemasyarakatan Hubungan Industrial

500.15.14 Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

500.15.14.1 Pengupahan

500.15.14.2 Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja

500.15.15 Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial

500.15.15.1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial

500.15.15.2 Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

500.15.15.3 Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

500.15.16 Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

500.15.16.1 Pengawasan Norma Kerja

500.15.16.2 Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat

500.15.16.3 Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja

500.15.17 Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak

500.15.17.1 Pengawasan Norma Kerja Perempuan

500.15.17.2 Pengawasan Norma Kerja Anak

500.15.17.3 Kerjasama Lintas Sektoral

500.15.17.4 Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak

500.15.18 Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

500.15.18.1 Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan BejanaTekan

500.15.18.2 Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran

500.15.18.3 Pengawasan Norma Kesehatan Kerja

500.15.18.4 Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya

500.15.18.5 Pengawasan Norma

Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3

500.15.19 Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan

500.15.20 Bina Penegakan Hukum

500.15.20.1 Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan

500.15.20.2 Penyidikan Norma Ketenagakerjaan

500.15.20.3 Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

500.15.20.4 Kerjasama Penegakan Hukum

500.15.21 Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

500.15.21.1 Analisis dan Standardisasi Bidang K 3

500.15.21.2 Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3

500.15.21.3 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3

500.15.21.4 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3

500.15.22 Pengembangan SDM dan Kompetensi K3

500.15.22.1 Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3

500.15.22.2 Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3

500.15.22.3 Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3

500.15.22.4 Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3

500.15.22.5 Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3

500.15.22.6 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3

500.16 PENANAMAN MODAL

500.16.1 Kebijakan di bidang Penanaman Modal yangdilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.16.2 Perencanaan Penanaman Modal

	500.16.2.1	Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber DayaAlam Lainnya
	500.16.2.2	Perencanaan Industri Manufaktur
	500.16.2.3	Perencanaan Jasa dan Kawasan
	500.16.2.4	Perencanaan Infrastruktur
500.16.3	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
	500.16.3.1	Deregulasi Penanaman Modal
	500.16.3.2	Pengembangan Potensi Daerah
	500.16.3.3	Pemberdayaan Usaha
	500.16.3.4	Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan
	500.16.3.5	Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha
	500.16.3.6	Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha
500.16.4	Promosi Penanaman Modal	
	500.16.4.1	Pengembangan Promosi
	500.16.4.2	Analisis Strategi Promosi
	500.16.4.3	Fasilitasi Promosi Luar Negeri
	500.16.4.4	Promosi Sektoral
	500.16.4.5	Fasilitasi Promosi Daerah
	500.16.4.6	Pameran dan Sarana Promosi
500.16.5	Kerja Sama Penanaman Modal	
	500.16.5.1	Kerja Sama Bilateral dan Mulitilateral
	500.16.5.2	Kerja Sama Regional
	500.16.5.3	Kerja Sama Dunia Usaha Internasional
500.16.6	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
	500.16.6.1	Pemantauan Penanaman Modal
	500.16.6.2	Data Realisasi Penanaman Modal
	500.16.6.3	Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal
	500.16.6.4	Fasilitasi Penyelesaian Masalah
	500.16.6.5	Pengawasan Penanaman Modal

500.16.6.6 Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal

500.16.7 Pelayanan Penanaman Modal

500.16.7.1 Pelayanan Aplikasi

500.16.7.2 Pelayanan Perijinan

500.16.7.3 Pelayanan Konsultasi Perijinan

500.16.7.4 Pelayanan Non Perijinan

500.16.7.5 Pelayanan Fasilitas

500.17 PERTANAHAN

500.17.1 Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.17.2 Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan

500.17.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah

500.17.2.2 Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan

500.17.2.3 Data dan Informasi Pertanahan

500.17.2.4 Advokasi dan Pengendalian

500.17.3 Penatagunaan dan Penguatan Atas Tanah

500.17.3.1 Penatagunaan Tanah

500.17.3.2 Data dan Pemetaan Tematik

500.17.3.3 Penguatan Atas Tanah

500.17.4 Sengketa Tanah

500.17.4.1 Pengkajian dan Penanganan Sengketa

500.17.4.2 Advokasi dan Pengendalian

500.18 TRANSMIGRASI

500.18.1 Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.18.2 Penyediaan Tanah Transmigrasi

500.18.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah

500.18.2.2 Pengurusan Legalitas Tanah

500.18.2.3 Dokumentasi Pertanahan

500.18.2.4 Advokasi Pertanahan

500.18.3 Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi

500.18.3.1 Penyiapan Lahan

500.18.3.2 Penyiapan Sarana

500.18.3.3 Penyiapan Prasarana

500.18.3.4 Evaluasi Kelayakan Permukiman

500.18.4 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi
- 500.18.4.1 Penyiapan Calon Transmigrasi
- 500.18.4.2 Penyiapan Perpindahan
- 500.18.4.3 Pelaksanaan Perpindahan
- 500.18.4.4 Penataan dan Adaptasi

500.18.5 Partisipasi Masyarakat
- 500.18.5.1 Promosi dan Motivasi
- 500.18.5.2 Kerjasama Kelembagaan
- 500.18.5.3 Kerjasama Antar Daerah
- 500.18.5.4 Pelayanan Investasi

500.18.6 Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
- 500.18.6.1 Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
- 500.18.6.2 Bina Sistem Informasi
- 500.18.6.3 Perencanaan Pengembangan Kawasan
- 500.18.6.4 Perencanaan Pengembangan Masyarakat
- 500.18.6.5 Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan

500.18.7 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyaraka
- 500.18.7.1 Bantuan Pangan dan Kesehatan
- 500.18.7.2 Fasilitas Sosial Budaya
- 500.18.7.3 Pengembangan Kelembagaan
- 500.18.7.4 Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi

500.18.8 Pengembangan Usaha
- 500.18.8.1 Kewirausahaan
- 500.18.8.2 Produksi
- 500.18.8.3 Pengolahan Hasil dan Pemasaran
- 500.18.8.4 Lembaga Ekonomi dan Permodalan

500.18.9 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan
- 500.18.9.1 Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana
- 500.18.9.2 Pengembangan Sarana
- 500.18.9.3 Pengembangan Prasarana
- 500.18.9.4 Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana

500.18.10 Penyerasian Lingkungan

500.18.10.1 Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

500.18.10.2 Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan

500.18.10.3 Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi

500.18.10.4 Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

600.1 PEKERJAAN UMUM

600.1.1 Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

600.1.2 Penatagunaan Sumber Daya Air

600.1.2.1 Perencanaan Wilayah Sungai

600.1.2.2 Kelembagaan

600.1.2.3 Pemanfaatan Sumber Daya Air

600.1.2.4 Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air

600.1.2.5 Pengaturan dan Pemantauan

600.1.3 Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air

600.1.3.1 Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air

600.1.3.2 Manajemen Mutu

600.1.3.3 Informasi dan Data Sumber Daya Air

600.1.3.4 Keterpaduan Pemrograman

600.1.4 Pengelolaan Sumber Daya Air

600.1.4.1 Pengelolaan Sungai dan Pantai

600.1.4.2 Pengelolaan Irigasi dan Rawa

600.1.4.3 Pengelolaan Bendungan, Danau, Sirtu, dan Embung

600.1.4.4 Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku

600.1.5 Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

600.1.5.1 Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai

600.1.5.2 Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa

	600.1.5.3	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Sirtu, dan Embung
	600.1.5.4	Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku
	600.1.5.5	Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
600.1.6	Pengendalian Bencana Lokal Lingkup	
600.1.7	Pengembangan Jaringan Jalan	
	600.1.7.1	Keterpaduan Perencanaan
	600.1.7.2	Sistem Jaringan Jalan
	600.1.7.3	Lingkungan dan Keselamatan Jalan
600.1.8	Pembangunan Jalan	
	600.1.8.1	Standar dan Pedoman
	600.1.8.2	Manajemen Konstruksi
	600.1.8.3	Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainase
	600.1.8.4	Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng
600.1.9	Preservasi Jalan	
	600.1.9.1	Standar dan Pedoman
	600.1.9.2	Perencanaan Teknis
	600.1.9.3	Teknik Rekonstruksi
	600.1.9.4	Teknik Pemeliharaan Jalan
600.1.10	Pengelolaan Jembatan	
	600.1.10.1	Standar dan Pedoman
	600.1.10.2	Perencanaan Teknis
	600.1.10.3	Teknik Jembatan
	600.1.10.4	Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus
600.1.11	Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah	
	600.1.11.1	Bimbingan Teknik Jalan Daerah
	600.1.11.2	Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar
	600.1.11.3	Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan
600.1.12	Pengaturan Jalan Tol	
	600.1.12.1	Persiapan pengusahaan jalan Tol
	600.1.12.2	Pengadaan Investasi Jalan Tol
	600.1.12.3	Teknik Pengaturan Jalan Tol
	600.1.12.4	Pengambil alihan hak

		Pengusahaan jalan tol
600.1.13	Keterpaduan Infrastruktur Permukiman	
	600.1.13.1	Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan
	600.1.13.2	Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan
600.1.14	Pengembangan Kawasan Permukiman	
	600.1.14.1	Perencanaan Teknis
	600.1.14.2	Kawasan Permukiman Perkotaan
	600.1.14.3	Kawasan Permukiman Pedesaan
	600.1.14.4	Kawasan Permukiman Khusus
	600.1.14.5	Kelembagaan
600.1.15	Pembinaan Penataan Bangunan	
	600.1.15.1	Perencanaan Teknis
	600.1.15.2	Penataan Bangunan Gedung
	600.1.15.3	Pengelolaan Rumah Negara
	600.1.15.4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus
	600.1.15.5	Kelembagaan
600.1.16	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
	600.1.16.1	Perencanaan Teknis
	600.1.16.2	Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan
	600.1.16.3	Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan
	600.1.16.4	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus
	600.1.16.5	Kelembagaan
	600.1.16.6	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
	600.1.16.7	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
600.1.17	Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman	
	600.1.17.1	Perencanaan Teknis
	600.1.17.2	Pengelolaan Air Limbah
	600.1.17.3	Pengelolaan Persampahan
	600.1.17.4	Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus
	600.1.17.5	Kelembagaan
	600.1.17.6	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja

600.1.18 Pemantauan dan Evaluasi

600.2 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

600.2.1 Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

600.2.2 Perencanaan Pembiayaan Perumahan

600.2.2.1 Keterpaduan Perencanaan

600.2.2.2 Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan

600.2.2.3 Kemitraan

600.2.3 Pola Pembiayaan Perumahan

600.2.3.1 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum

600.2.3.2 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan

600.2.3.3 Pola Investasi Perumahan

600.2.4 Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan

600.2.4.1 Sumber Pembiayaan Primer

600.2.4.2 Sumber Pembiayaan Sekunder

600.2.4.3 Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya

600.2.4.4 Sistem Pembiayaan Perumahan

600.2.4.5 Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan

600.2.5 Perencanaan Penyediaan Perumahan

600.2.5.1 Keterpaduan Perencanaan

600.2.5.2 Analisa Teknik

600.2.5.3 Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian

600.2.5.4 Kemitraan dan Kelembagaan

600.2.6 Penyediaan Rumah Susun

600.2.6.1 Perencanaan Teknik

600.2.6.2 Penyediaan

600.2.6.3 Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan

600.2.6.4 Pengelolaan

600.2.7 Penyediaan Rumah Khusus

600.2.7.1 Perencanaan Teknik

600.2.7.2 Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus

	600.2.7.3	Bimbingan teknis dan Supervisi
	600.2.7.4	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya
	600.2.7.5	Perencanaan Teknik
	600.2.7.6	Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni
	600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan
600.2.8	Penyediaan Rumah Umum dan Komersial	
	600.2.8.1	Perencanaan Teknik
	600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum
	600.2.8.3	Fasilitasi Hunian Berimbang
	600.2.8.4	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan
600.2.9	Investasi Infrastruktur	
	600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur
	600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur
	600.2.9.3	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur
	600.2.9.4	Pasar Infrastruktur
600.2.10	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	
	600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan
	600.2.10.2	Kontrak Konstruksi
	600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan
	600.2.10.4	Manajemen Mutu
600.2.11	Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	
	600.2.11.1	Kelembagaan
	600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi
	600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri
	600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi
600.2.12	Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	
	600.2.12.1	Standar dan Materi Kompetensi
	600.2.12.2	Penerapan Kompetensi
	600.2.12.3	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi
	600.2.12.4	Pengembangan Produktivitas

600.2.13 Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
600.2.13.1 Peningkatan Kerjasama
600.2.13.2 Pemberdayaan Jasa Konstruksi
600.2.14 Peningkatan Jasa Konstruksi
600.2.14.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja
600.2.14.2 Pelaksanaan Pengendalian Mutu
600.2.15 Penerapan Teknologi Konstruksi
600.2.15.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi
600.2.15.2 Pengembangan Materi
600.2.15.3 Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi
600.2.16 Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)
600.2.16.1 Antar Sektor
600.2.16.2 Antar Wilayah
600.2.17 Pengembangan Kawasan Strategis
600.2.17.1 Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis
600.2.17.2 Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis
600.2.18 Pengembangan Kawasan Perkotaan
600.2.18.1 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan
600.2.18.2 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru
600.2.18.3 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan
600.2.18.4 Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan
600.2.18.5 Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)
600.2.19 Pemantauan dan Evaluasi

600.3 TATA RUANG (TATA KOTA)
600.3.1 Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah
600.3.2 Perencanaan
600.3.2.1 Tata Ruang Wilayah

Kabupaten (RT/RW)

600.3.2.2 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

600.3.2.3 Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten

600.3.2.4 Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)

600.3.2.5 Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan PrasaranaKabupaten

600.3.2.6 Rencana Teknis Prasarana Kota

600.3.2.7 Rencana Teknis Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kota Prasarana Kota

600.3.3 Pemanfaatan dan Pengendalian

600.3.3.1 Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang

600.3.3.2 Ijin Pemanfaatan Ruang

600.3.3.3 Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang

600.3.4 Pemetaan

600.3.4.1 Peta Dasar

600.3.4.2 Survey Pemetaan Ruang Darat

600.3.4.3 Survey Pemetaan Ruang Air

600.3.4.4 Survey Pemetaan Ruang Udara

600.4 LINGKUNGAN HIDUP

600.4.1 Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yangdilakukan oleh Pemerintah Daerah

600.4.2 Perencanaan Pemanfaatan Sumber DayaAlam dan Lingkungan Hidup

600.4.2.1 Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan

600.4.2.2 Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

600.4.3 Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor

600.4.3.1 Evaluasi Penerapan

600.4.3.2 Perencanaan Lingkungan Hidup

600.4.4 Ekonomi Lingkungan

600.4.5 Dampak Lingkungan

	600.4.5.1	Bimtek Dampak Lingkungan
	600.4.5.2	Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan
	600.4.5.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
600.4.6	Pemantauan dan Pengawasan	
	600.4.6.1	Manufaktur Prasarana dan Jasa
	600.4.6.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
	600.4.6.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
	600.4.6.4	Udara Sumber Bergerak
600.4.7	Evaluasi dan Pengembangan	
	600.4.7.1	Manufaktur, Prasarana, dan Jasa
	600.4.7.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
	600.4.7.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
	600.4.7.4	Udara Sumber Bergerak
600.4.8	Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan	
	600.4.8.1	Pengembangan
	600.4.8.2	Pemanfaatan
	600.4.8.3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik
	600.4.8.4	Keamanan Hayati
	600.4.8.5	Pengendalian kerusakan Lahan
600.4.9	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat	
	600.4.9.1	Kerusakan Ekosistem
	600.4.9.2	Rawa
600.4.10	Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer	
	600.4.10.1	Perangkat mitigasi
	600.4.10.2	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
	600.4.10.3	Pengendalian Bahan Perusak Ozon
	600.4.10.4	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan
600.4.11	Adaptasi Perubahan Iklim	
	600.4.11.1	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim,

		Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perubahaan Iklim
	600.4.11.2	Kerentanan Perubahan Iklim
600.4.12	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	
	600.4.12.1	Registrasi dan Notifikasi
	600.4.12.2	Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun
	600.4.12.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
600.4.13	Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun	
	600.4.13.1	Pengumpulan dan pemanfaatan
	600.4.13.2	Pengangkutan dan Pengolahan
	600.4.13.3	Penimbunan dan Dumping
	600.4.13.4	Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas
600.4.14	Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3	
	600.4.14.1	Pemantauan
	600.4.14.2	Tanggap darurat dan Pemelihan Kontaminasi
600.4.15	Pengelolaan Sampah	
	600.4.15.1	Pembatasan sampah
	600.4.15.2	Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
	600.4.15.3	Pembentukan Dewan Adipura
	600.4.15.4	Penetapan pemenang adipura
600.4.16	Hukum Administrasi Lingkungan	
	600.4.16.1	Pengelolaan dan Pengembangan pengaduan
	600.4.16.2	Penataan hukum administrasi Lingkungan
600.4.17	Penyelesaian Sengketa Lingkungan	
	600.4.17.1	Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan
	600.4.17.2	Penyelesaian sengketa Lingkungan di luar pengadilan
600.4.18	Penegakan hukum pidana lingkungan	
	600.4.18.1	Penyidikan
	600.4.18.2	Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut

600.4.18.3 Koordinasi pembinaan Penyidik PNS

600.4.19 Komunikasi Lingkungan

600.4.19.1 Pengembangan Komunikasi

600.4.19.2 Publikasi dan Kampanye

600.4.20 Penguatan Inisiatif Masyarakat

600.4.20.1 Komunitas Pendidikan Lingkungan

600.4.20.2 Kearifan Lingkungan

600.4.21 Peningkatan Peran Masyarakat

600.4.21.1 Masyarakat Perkotaan

600.4.21.2 Masyarakat Pedesaan

600.4.22 Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan

600.4.22.1 Organisasi Sosial Masyarakat

600.4.22.2 Organisasi Profesi Dunia Usaha

600.4.23 Data dan Informasi Lingkungan

600.4.23.1 Pengelolaan Data

600.4.23.2 Pengelolaan Informasi

600.4.23.3 Pengembangan Perangkat Lunak

600.4.23.4 Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan

600.4.24 Kelembagaan Lingkungan

600.4.24.1 Kelembagaan dan Tata Laksana

600.4.24.2 Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal

600.4.25 Standarisasi dan teknologi

600.4.25.1 Standarisasi Manajemen dan Pengujian Lingkungan

600.4.25.2 Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan

600.4.25.3 Teknologi Ramah Lingkungan

600.4.26 Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan

600.4.26.1 Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan

600.4.26.2 Laboratorium Rujukan dan Pengujian

700 PENGAWASAN

700.1 PENGAWASAN INTERNAL

700.1.1 Rencana Pengawasan

	700.1.1.1	Rencana Strategis Pengawasan
	700.1.1.2	Rencana Kerja Pengawas Tahunan
	700.1.1.3	Rencana Kinerja Tahunan
	700.1.1.4	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan
	700.1.1.5	Rakor Pengawasan Tingkat Daerah
700.1.2	Pelaksanaan Pengawasan	
	700.1.2.1	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)
	700.1.2.2	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut
	700.1.2.3	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut
	700.1.2.4	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
	700.1.2.5	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
	700.1.2.6	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
	700.1.2.7	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
	700.1.2.8	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review
	700.1.2.9	*Good Corporate Governance (GCG)*
	700.1.2.10	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
	700.1.2.11	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
	700.1.2.12	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara

700.1.2.13 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

700.1.2.14 Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review

700.1.2.15 *Good Corporate Governance (GCG)*

800 KEPEGAWAIAN

800.1 SUMBER DAYA MANUSIA

800.1.1 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara

800.1.1.1 Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan data kebutuhan

800.1.1.2 Perencanaan Pertimbangan Formasi Antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas

800.1.1.3 Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara

800.1.1.4 Standarisasi Jabatan Antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan

800.1.2 Formasi dan Pengadaan Pegawai

800.1.2.1 Formasi ASN Antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus

800.1.2.2 Proses Rekrutmen/ Pengadaan ASN Antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN

800.1.2.3 Pengumuman Kelulusan ASN

800.1.2.4 Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima

800.1.2.5 Pengangkatan ASN

800.1.2.6 Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan)

	800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN
	800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN
800.1.3	Mutasi Pegawai	
	800.1.3.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN.
	800.1.3.2	Kenaikan Kenaikan Pangkat/ Golongan /Jabatan
	800.1.3.3	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional
	800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai
	800.1.3.5	Peninjauan Masa Kerja
	800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)
800.1.4	Pengembangan Karir	
	800.1.4.1	Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta
	800.1.4.2	Penyesuaian ijazah
	800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier
	800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi
	800.1.4.5	Angka Kredit Antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit,nilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit
800.1.5	Kinerja Aparatur Sipil Negara	
	800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja
	800.1.5.2	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
	800.1.5.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja

800.1.6	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN	
	800.1.6.1	Kode Etik Pegawai
	800.1.6.2	Disiplin
	800.1.6.3	Pemberhentian Dengan Hormat
	800.1.6.4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
	800.1.6.5	Pemberhentian Sementara
	800.1.6.6	Pensiun ASN Antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, 122 Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/ Dudanya
800.1.7	Bantuan Hukum	
800.1.8	Status dan Kedudukan Pegawai	
	800.1.8.1	Status Kepegawaian
	800.1.8.2	Kedudukan Kepegawaian
	800.1.8.3	Keberatan Pegawai
	800.1.8.4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
800.1.9	Sistem Informasi Kepegawaian	
	800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
	800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
	800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektonik
	800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
800.1.10	Pengawasan dan pengendalian	
	800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
	800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan
	800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
	800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan PensiunASN
	800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian

	800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer
800.1.11	Administrasi Pegawai	
	800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
	800.1.11.2	Cuti Sakit
	800.1.11.3	Cuti Bersalin
	800.1.11.4	Cuti Tahunan
	800.1.11.5	Cuti Alasan Penting
	800.1.11.6	Cuti Besar
	800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara
	800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu
	800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan
	800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
	800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
	800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
	800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan
800.1.12	Kesejahteraan Pegawai	
	800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
	800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS
	800.1.12.3	Tabungan Perumahan
	800.1.12.4	Bantuan Sosial
	800.1.12.5	Pakaian Dinas
	800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas
	800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih
	800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
	800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi
	800.1.12.10	Rekam Medis
800.1.13	Administrasi Perseorangan	
	800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
	800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
	800.1.13.3	Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan
	800.1.13.4	Sekretaris Daerah

		800.1.13.5	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional
	800.1.14	Penilaian Kompetensi	
		800.1.14.1	Penilaian Kompetensi
		800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi
800.2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	800.2.1	Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	800.2.2	Pendidikan dan Pelatihan	
		800.2.2.1	Sistem Informasi program dan pembinaan diklat
		800.2.2.2	Pedoman - pedoman kediklatan
		800.2.2.3	Kurikulum-kurikulum diklat
		800.2.2.4	Modul-modul diklat
		800.2.2.5	Panduan fasilitator
		800.2.2.6	Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat
		800.2.2.7	Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat
		800.2.2.8	Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat
		800.2.2.9	Konsultasi, advokasi, asistensi diklat
	800.2.3	Widyaiswara	
		800.2.3.1	Seleksi dan pengembangan Widyaiswara
		800.2.3.2	Sertifikasi Widyaiswara
		800.2.3.3	Monitoring dan evaluasi Widyaiswara
		800.2.3.4	Penilaian Widyaiswara
		800.2.3.5	Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara
		800.2.3.6	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara
	800.2.4	Penyelenggaraan Diklat	
		800.2.4.1	Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat
		800.2.4.2	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat
		800.2.4.3	Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat

800.2.4.4	Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran
800.2.4.5	Sistem informasi diklat
800.2.4.6	Monitoring Penyelenggara Diklat
800.2.4.7	Monitoring dan evaluasi Pasca diklat
800.2.5	Alumni

900 KEUANGAN

900.1 KEUANGAN DAERAH

900.1.1	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)	
	900.1.1.1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
	900.1.1.2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)
	900.1.1.3	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
	900.1.1.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)
900.1.2	Penyusunan Anggaran	
	900.1.2.1	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan
	900.1.2.2	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota
	900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah
	900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
900.1.3	Pelaksanaan Anggaran	
	900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS
	900.1.3.2	Pendapatan

	900.1.3.3	Belanja
	900.1.3.4	Pembiayaan Daerah
	900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan
	900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
	900.1.3.7	Daftar Gaji
	900.1.3.8	Kartu Gaji
	900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)
	900.1.3.10	Laporan Keuangan
900.1.4	Pinjaman/Hibah Luar Negeri	
	900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/ Hibah Luar Negeri *(Blue Book)*
	900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai *(Green Book)*
	900.1.4.3	Dokumen *Memorandum of Understanding (MoU)*, dan dokumen sejenisnya
	900.1.4.4	Dokumen Loan Agremeent (PHLN) Antara lain: *Draft Agreement, Legal Opinion*, Surat Menyurat dengan Lender
	900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: usulan luncuran dana
	900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya
	900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana *(Payment Advice)*
	900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l.: SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.
	900.1.4.9	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain: *No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA)*
	900.1.4.10	*Staff Appraisal Report*

	900.1.4.11	*Report* /Laporan
	900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah
	900.1.4.13	*Completion Report/Annual Report*
	900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/ Hibah Luar Negeri
900.1.5	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (PHLN)	
900.1.6	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	
	900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
	900.1.6.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi
	900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
	900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan /Triwulanan /Semesteran
900.1.7	Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan	
	900.1.7.1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk *Specimen* Tanda Tangan
	900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR- SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, *bilyet giro*, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l.: Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/*Service Report* dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
	900.1.7.3	Buku Rekening Bank
	900.1.7.4	Keputusan Pembukuan Rekening
	900.1.7.5	Pembukuan anggaran terdiri antara lain: Buku

		Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran
900.1.8	Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan	
	900.1.8.1	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya
	900.1.8.2	Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan
900.1.9	Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD meliputi: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD	
900.1.10	Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu	

	900.1.10.1	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu
	900.1.10.2	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/ Pemilu
	900.1.10.3	Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank
	900.1.10.4	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revi si nya
900.1.11	Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah	
	900.1.11.1	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan
	900.1.11.2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
	900.1.11.3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
	900.1.11.4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah
900.1.12	Anggaran Daerah	
	900.1.12.1	Anggaran Daerah
	900.1.12.2	Dukungan Teknis Anggaran Daerah
900.1.13	Pendapatan dan Investasi Daerah	
	900.1.13.1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan

		retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah
	900.1.13.2	Badan Usaha Milik Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah
	900.1.13.3	Badan Layanan Umum Daerah Antara lain: analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
	900.1.13.4	Pengelolaan Kekayaan Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi

		daerah
	900.1.13.5	Pinjam Dan Obligasi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan 128 pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah
900.1.14	Fasilitasi Dana Perimbangan	
	900.1.14.1	Fasilitasi Dana Alokasi Umum Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum
	900.1.14.2	Fasilitasi Dana Alokasi Khusus Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus
	900.1.14.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber

		daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam
	900.1.14.4	Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya Antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya
	900.1.14.5	Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan
900.1.15	Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	
	900.1.15.1	Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertangungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
	900.1.15.2	Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan

	daerah pertanggung jawaban keuangan daerah
900.1.15.3	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah
900.1.15.4	Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli Antara lain: Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggung jawaban keuangan daerah
900.1.15.5	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertangung jawaban pelaksanaan keuangan daerah, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertangung jawaban pelaksanaan keuangan daerah, Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Pj. Bupati Takalar

SETIAWAN ASWAD